



**DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN**

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



2024 LAPORAN LKJIP

Disusun Oleh:

Dinas Pariwisata Provinsi Banten



**DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023-2026 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2024.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Banten di masa yang akan datang, Amin.

Serang, Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS
PARISWATA PROVINSI BANTEN



Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si
NIP. 197306082002122003

DAFTAR ISI

Cover	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Tujuan	1
1.3. Dasar Hukum	1
1.4. Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5. Isu – isu Strategis	13
1.6. Proses Bisnis	15
1.7. Tindak Lanjut LHE SAKIP	19
1.8. Sistematika Laporan	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
2.1. Rencana Strategis Perubahan 2023 – 2026.....	33
2.2. Rencana Kerja Perubahan 2024	34
2.3. Perjanjian Kerja Tahun 2024	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1. Capaian Kinerja 2024	46
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	47
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun Terakhir	77
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	78

3.1.4	Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada);	79
3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi Yang telah dilakukan	80
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	82
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).....	84
3.2	Realisasi Anggaran	94
3.3	Inovasi	99
BAB IV	PENUTUP	101
4.1	Kesimpulan	101
4.2	Saran dan Rekomendasi	102

Lampiran – lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Esselon 2 Perubahan Tahun 2024
2. Surat Pernyataan Telah di Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Capaian Strategis 1 :

“ Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)”

Bahwa kunjungan wisatawan pada tahun 2024 jumlahnya lebih menurun, hal ini disebabkan data kunjungan wisatawan 2024 perolehan kunjungan wisatawan pada saat disampaikan laporan ini masih dalam proses (batas akhir pelaporan s.d tanggal 10 Januari 2025) sehingga prosentase capaian sementara adalah 92,15 %

Analisis ketercapaian kinerja sasaran pertama “Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)” adalah sebagai berikut :

1. Prosentase capaian diangka 106,65 % dimana angka ini merupakan angka Final yang terkumpul berdasarkan data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dari Kab/Kota yang dilaporkan ke Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kunjungan belum dapat disandingkan apakah meningkat atau menurun sebab angka kunjungan tahun 2024 masih akan mengalami peningkatan
3. Ketercapaian kunjungan wisatawan ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pihak swasta, pokdarwis dan masyarakat Banten yang telah mengoptimalkan peran dan fungsi masing – masing
4. Terdapat program sustainable development goals (SDG's) pada sector pariwisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dapat dijalankan dengan baik oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagaimana yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Bidang Destinasi Pariwisata.
5. Berjalannya output seluruh aktifitas program dan kegiatan sehingga pencapaian kinerjanya dapat dirasakan tidak hanya oleh pemangku kepentingan melainkan juga wisatawan yang berkunjung ke Banten

Capaian Strategis kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan” keberhasilannya dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :

II. Capaian Strategis 2 :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan”

pada tahun 2024 jumlahnya meningkat, hal ini disebabkan berjalan efektif dan efisiennya seluruh capaian program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut serta beberapa hal lainnya yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Pada saat dilakukan penilaian oleh APIP terpenuhinya seluruh
2. komponen penilaian SAKIP dengan peroleh skor 78.15 % dari target 70.00 % sehingga capaiannya mencapai 111,64 %
3. Terpenuhinya komponen atau nilai indikator pada setiap aspek perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan oleh evaluator SAKIP Inspektorat.
4. Adanya tools yang disediakan oleh Bappeda dan BKD seperti penggunaan system manajemenn pengukuran kinerja (SIKAP) oleh BKD Banten mempermudah para Middle manager (PPTK) melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pekerjaan harian yang umumnya terhubung dengan kegiatan baik sebagai kinerja penunjang maupun pendukung sehingga efektifitas pengawasan berjalan baik dan hal tersebut serta adanya penilain kinerja program/kegiatan yang terakomodir dalam Sistem Informasi Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (SIMAKIP) berdampak terhadap performa kinerja serta lebih akuntabel
5. Berjalannya core asn value yang ditandai dengan lebih disiplin nya para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan serta mampu mempedomani nilai – nilai dalam ASN Berakhkal tersebut.
6. Adanya pedoman pelaksanaan kegiatan yang dapat dipedomani oleh aparatur pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan, pengelolaan asset serta perencanaan dan pelaporan memudahkan para aparatur dalam melaksanakan kegiatannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 adalah pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran hingga Sub kegiatan yang selaras. Untuk mendukung pelaporan kinerja akuntabel diperlukan pedoman dalam menyusun laporan kinerja di maksud, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi yang menjadi acuan dalam menyusun pelaporan kinerja yang efektif dan akuntabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada masa Rencana Strategis Dinas tahun 2023-2026.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 berupaya merespon masukan, saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Agar prinsip *Good Governance* dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

1.2 Maksud Tujuan

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan *managerial* yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas Pariwisata bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2024, Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

A. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- d. Kepala Bidang Pemasaran;
- e. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- h. Unit Plaksana Teknis Dinas

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dinas pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada tugas dan fungsi no (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;
 - a. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;

- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan.

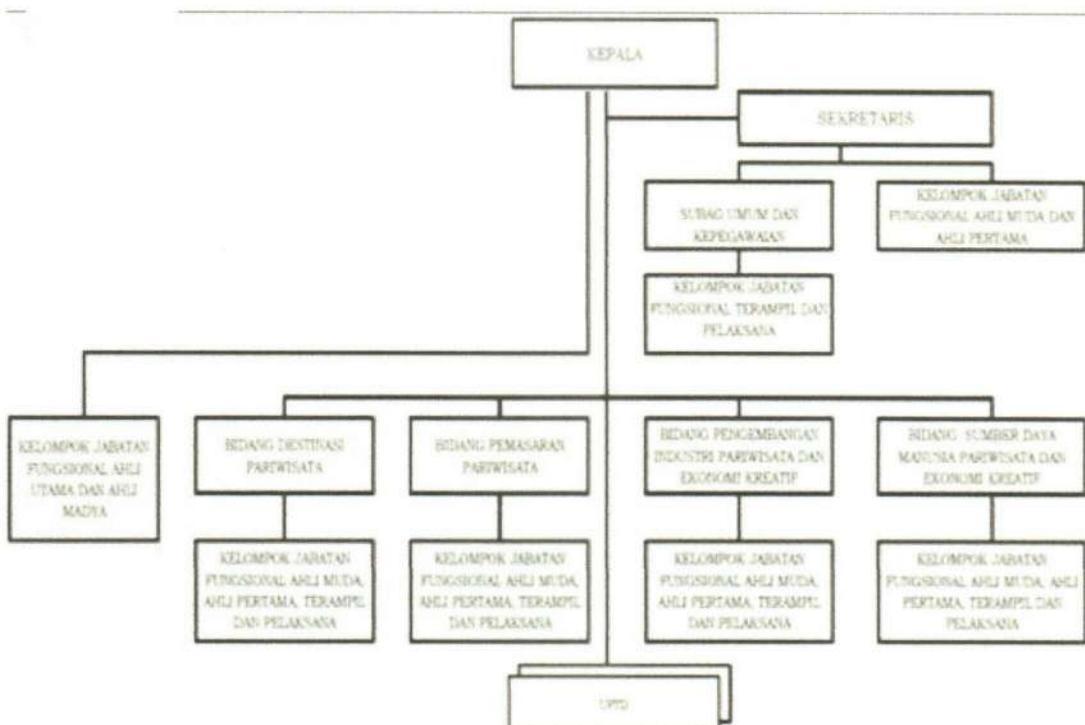
C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :

- i. Kepala Dinas;
- j. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- l. Kepala Bidang Pemasaran;
- m. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- n. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- o. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- p. Unit Plaksana Teknis Dinas

Struktur organisasi Dinas Pariwisata tergambar sebagai berikut :

Gambar 1.4



Berikut adalah uraian tugas pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata;
- 2) Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan;
 - a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata,
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Pengembangan ekon
 - d. omi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - e. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pelaporan Dinas Pariwisata;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - i. Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - ii. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;

- 2) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 4) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pariwisata;
- 5) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas;
- 6) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Dinas;
- 7) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- 9) Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas;
- 10) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 11) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 12) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 16) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, menyelenggarakan kearsipan, pengelolaan barang dan asset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Pariwisata.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Dinas;
 - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas;
 - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas;
 - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

- a. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;

- 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi,
 - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi,
 - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi,
 - d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

- a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;

- b. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- a. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
 - b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- a. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata

dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan DI di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
 - b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9). Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif ada 39 butir kegiatan / uraian tugas meliputi:

1. menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata;
2. melakukan analisis bahan penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan;
3. melakukan analisis bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan;
4. menyusun usulan rencana kerja bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. melakukan analisis bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

6. melaksanakan pembinaan perizinan berusaha sektor Pariwisata kepada pelaku usaha Pariwisata;
7. melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sektor Pariwisata yang telah ditetapkan;
8. melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. menyusun profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. melakukan analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
11. menyusun standar kompetensi untuk jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi;
12. menyusun usulan rencana kerja bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. melakukan telaah bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata;
14. menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
15. menyusun bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
16. menyusun bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
17. menyusun telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota;
18. menyusun usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah /swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota;
20. menyusun usulan rencana kerja bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. melakukan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. mengidentifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. melakukan kajian bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
24. melakukan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

25. menyusun usulan rencana kerja bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
26. memelopori dan menyusun kajian skema pendanaan yang sesuai bagi pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
27. menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
28. melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan;
29. menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
30. melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan berbasis syariah;
31. menyusun pemetaan komponen daya tarik wisata;
32. menyusun konsep surat tanggapan dan surat sanggahan terkait dengan fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
33. melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
34. menyusun dokumen deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
35. melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
36. mengidentifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
37. menyusun pedoman rancangan basis data ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
38. melaksanakan pendampingan transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
39. melakukan pendampingan sharing economy Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.5 Isu - isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh sebab itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata. Analisa SWOT terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata sesuai keadaan potensi pariwisata di Provinsi Banten.

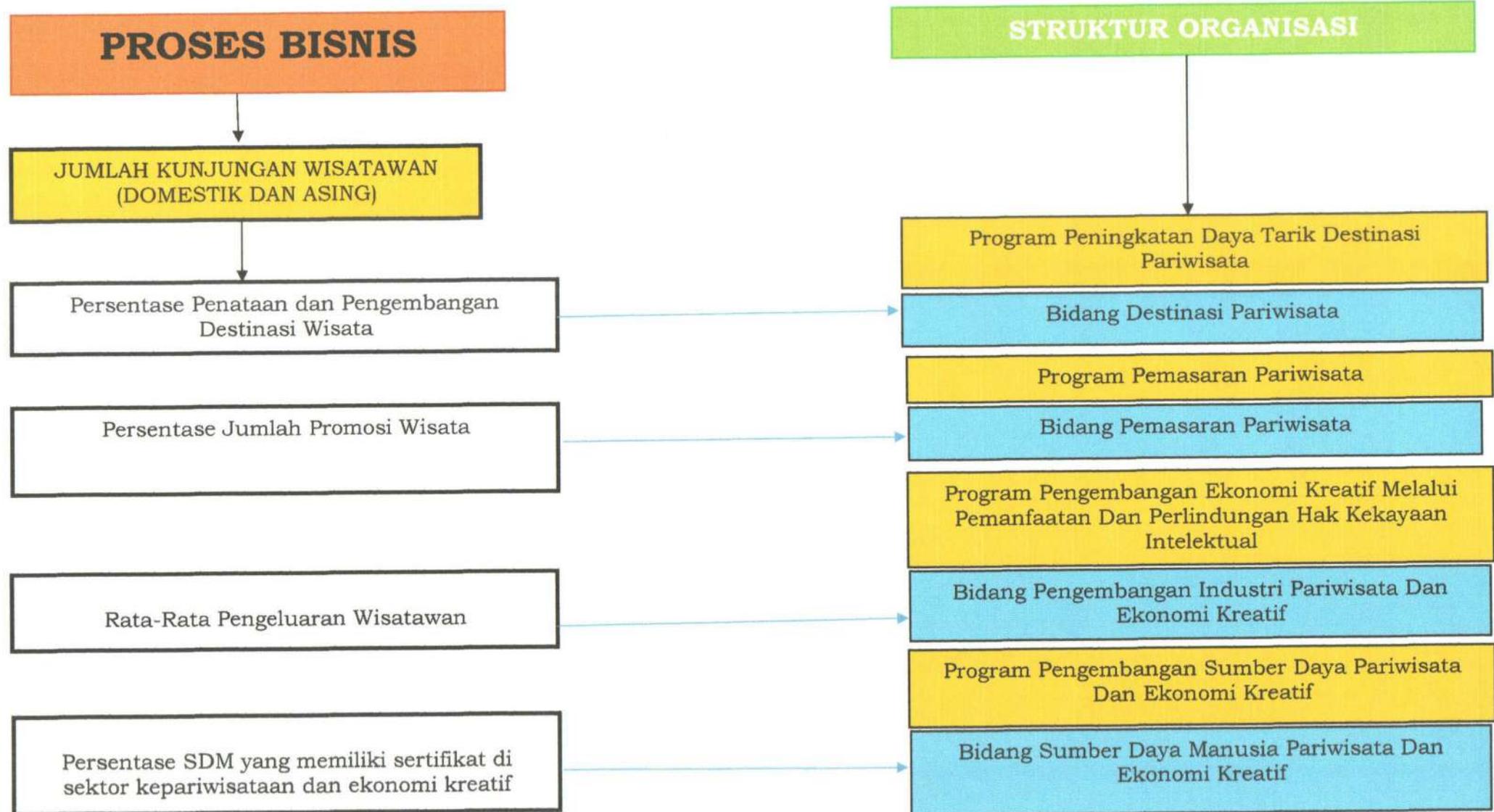
Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Provinsi Banten ditinjau dari gambaran pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata. Isu strategis Daerah “Daya Saing Perekonomian” di lingkungan urusan pariwisata Provinsi Banten adalah “Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19”. Isu strategis Dinas Pariwisata adalah “Rendahnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Daya Saing Ekonomi Kreatif”. Isu Strategis Dinas Pariwisata tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Belum memadai pengelolaan destinasi pariwisata dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, dan amenities;
2. Belum optimal peran masyarakat dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dunia usaha pariwisata;
3. Belum optimal Promosi destinasi pariwisata di dalam & luar negeri secara langsung dan melalui pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
4. Terbatasnya dukungan pemerintah kabupaten/kota mendukung promosi pariwisata daerah;
5. Rendahnya Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
6. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi kepariwisataan untuk mendukung penetapan kebijakan dan operasional kepariwisataan;

1.6 Proses Bisnis

Gambar 1.3

KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI



Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

Gambar 1.1

**SKEMA PENUANGAN POHON KINERJA KE KOMPONEN
PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN
DINAS PARIWISATA**



Gambar 1.2

Program	Program	Program	Program
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program
Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya Informasi Pariwisata	Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif	Meningkatnya kompetensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja
1. Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Rata-Rata Lama inap	1. Persentase Jumlah Promosi Wisata 2. Persentase Kunjungan Jumlah Wisatawan	1. Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan 2. Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	Persentase SDM yang memiliki sertifikat di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif
Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1. Terkelolaanya Daya Tarik Wisata Provinsi 2. Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3. Terkelolanya Destinansi Pariwisata Provinsi 4. Terlaksananya Penetapan Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 2. Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 	<p>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

1.7 Tindak Lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	DAFTAR DOKUMEN	LINK EVIDEN
1.	Menyusun Diagram Crosscutting yang memberikan informasi hubungan kinerja/aktivitas /aspek Crosscutting yang disusun menunjukkan kesinambungan antar unit kerja dan bidang	Telah tersedia Diagram Crosscutting yang menggambarkan hubungan kinerja/aktivitas/aspek Crosscutting telah disusun dalam dokumen proses bisnis Dinas Pariwisata Provinsi Banten	11 November 2024	11 November 2024	Telah didapatkan informasi terkait hubungan kinerja/aktivitas/aspek Crosscutting (keterkaitan) pada Diagram Crosscutting proses bisnis Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dokumen Proses Bisnis Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2023 - 2026	https://drive.google.com/file/d/1_ljukXB8MdbECGPbzn03miw30vZKZH3/view?usp=sharing
2.	Menyusun dokumen renja perubahan mengurai secara jelas permasalahan yang terjadi pada triwulan II yang dijadikan dasar dalam perbaikan atau	Dokumen renja perubahan telah mengurai permasalahan tidak hanya triwulan II melainkan 1 tahun pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten	11 November 2024	11 November 2024	Dokumen renja perubahan telah mengurai permasalahan tidak hanya triwulan II melainkan 1 tahun pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dokumen Renja Perubahan TA. 2023 pada Bab II Halaman 5	https://docs.google.com/document/d/1qe5DO7bAZWz7YEVbYmDFpWqHIcoSmbvic_FP8pTOJRI/edit?usp=sharing

	penyempurnaan rencana kinerja yang dituangkan dalam dokumen rencana perubahan						
3.	Menyusun definisi operasional yang jelas untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis: a. Pengumpulan data kinerja menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) dan dipergunakan sebagai pengumpulan data dapat dimanfaatkan ke dalam bentuk pelaporan tahunan dalam mengukur kinerja memanfaatkan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melakukan pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah menyesuaikan dan melakukan : a. Pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) yaitu Sistem Informasi Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (SIMAKIP) sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja b. Pengukuran data kinerja telah menggunakan	11 November 2024	11 November 2024	Telah dilakukan koordinasi oleh Dinas Pariwisata terkait penggunaan aplikasi pada pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Dari hasil koordinasi didapat hasil sebagai berikut : a. Pengumpulan data kinerja menggunakan SIMRAL yang selanjutnya mengalami perubahan nama menjadi	1. Laporan Kinerja SIMAKIP 2. Pergub 48 Tahun 2022	1. https://drive.google.com/file/d/1selVomnYNHJmNEdkMXtBBTch-MTuhWXh/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1CU7Cx7X5DEpqXF11CpvPGNuDesIFjHhJ/view?usp=sharing

	<p>n teknologi informasi.</p> <p>b. Pengukuran data kinerja menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) dapat dimanfaatkan ke dalam bentuk pelaporan tahunan</p> <p>c. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional melaksanakan mutasi pegawai dalam dasar kinerja pegawai tersebut (sangat baik, baik, butuh perbaikan atau kurang)</p> <p>d. Pengukuran</p>	<p>teknologi informasi (Aplikasi) yaitu Sistem Informasi Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (SIMAKIP) sesuai Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja</p> <p>c. Pengukuran kinerja telah digunakan melalui system e kinerja yang menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dengan kriteria penilaian (sangat baik, baik, butuh perbaikan atau kurang)</p> <p>d. Pengukuran</p>			<p>aplikasi SIMAKIP</p> <p>b. Pengumpulan data dan pengukuran kinerja menggunakan SIMRAL yang selanjutnya mengalami perubahan nama menjadi aplikasi SIMAKIP</p> <p>c. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional melaksanakan mutasi mengikuti Pergub 48</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>kinerja mampu mempengaruhi penyediaan (Refocusing) organisasi bahwa refocusing organisasi dialihkan berdasarkan arahan kebijakan Kementerian Menpan RB (alih jabatan structural ke fungsional) belum berdasarkan hasil pengukuran kinerja / beban kerja pada Perangkat Daerah</p>	<p>kinerja mampu mempengaruhi penyediaan (Refocusing) organisasi bahwa refocusing organisasi hal ini ditandai dengan adanya alih fungsi jabatan eselon IV yang dirubah menjadi fungsional: 1.Fungsional Adyatama Kepariwisata dan ekonomi kreatif 2.Fungsional Perencana ahli muda</p>			<p>Tahun 2022 d. Pengukuran kinerja mampu mempengaruhi penyediaan (Refocusing) organisasi bahwa refocusing organisasi berdasarkan Pergub 48 Tahun 2022</p>		
4.	<p>Menyusun rencana kerja disertai dengan perubahan aktivitas pada dokumen rencana aksi</p>	<p>Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melakukan perubahan aktivitas pada dokumen rencana aksi yang terdapat dalam</p>	<p>11 November 2024</p>	<p>11 November 2024</p>	<p>Dalam kolom tabel 3.2 Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024</p>	<p>Dokumen Renja Perubahan untuk rencana kerja dan perubahan</p>	<p>https://docs.google.com/document/d/1qe5DO7bAZWz7YEVbYmDFpWqHIcoSmbvic_FP8pTOJRI/edit?usp=sharing</p>

		dokumen renja perubahan			Provinsi Banten telah menjelaskan terkait rencana kerja disertai dengan perubahan aktivitas pada dokumen rencana aksi	aktivitas pada dokumen rencana aksi terdapat pada tabel 3.2 Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Banten	
5.	Informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas pada rencana aksi melalui dokumen perubahan rencana aksi serta penyesuaian	Informasi dalam laporan kinerja yang tercantum dalam LKJIP 2023 pada Bab IV Penutup di bagian 4.2 Saran dan Rekomendasi untuk tahun berikutnya	11 November 2024	11 November 2024	Informasi dalam laporan kinerja yang tercantum dalam LKJIP 2023 pada Bab IV Penutup di bagian 4.2 Saran dan Rekomendasi untuk tahun berikutnya	Dokumen LKJIP 2023 tercantum dalam LKJIP 2023 pada Bab IV Penutup di bagian 4.2 Saran dan Rekomendasi untuk tahun	https://drive.google.com/file/d/1owhELPI_WXhmB2bu8SJc_uKhLiMXmvHVf/view?usp=sharing

	<p>kinerja mampu mempengaruhi penyediaan (Refocusing) organisasi bahwa refocusing organisasi dialihkan berdasarkan arahan kebijakan Kementerian Menpan RB (alih jabatan structural ke fungsional) belum berdasarkan hasil pengukuran kinerja / beban kerja pada Perangkat Daerah</p>	<p>kinerja mampu mempengaruhi penyediaan (Refocusing) organisasi bahwa refocusing organisasi hal ini ditandai dengan adanya alih fungsi jabatan eselon IV yang dirubah menjadi fungsional: 1.Fungsional Adyatama Kepariwisata dan ekonomi kreatif 2.Fungsional Perencana ahli muda</p>			<p>Tahun 2022 d. Pengukuran kinerja mampu mempengaruhi penyediaan (Refocusing) organisasi bahwa refocusing organisasi berdasarkan Pergub 48 Tahun 2022</p>		
4.	<p>Menyusun rencana kerja disertai dengan perubahan aktivitas pada dokumen rencana aksi</p>	<p>Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melakukan perubahan aktivitas pada dokumen rencana aksi yang terdapat dalam</p>	<p>11 November 2024</p>	<p>11 November 2024</p>	<p>Dalam kolom tabel 3.2 Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024</p>	<p>Dokumen Renja Perubahan untuk rencana kerja dan perubahan</p>	<p>https://docs.google.com/document/d/1qe5DO7bAZWz7YEVbYmDFpWqHlcoSmbvic_FP8pTOJRI/edit?usp=sharing</p>

		dokumen renja sebagai bentuk perubahan laporan prosiding yang harus disampaikan di akhir tahun pelaksanaan kegiatan oleh masing – masing bidang			Provinsi Banten telah menjelaskan laporan prosiding terkait rencana kerja harus disampaikan di akhir tahun pelaksanaan kegiatan oleh masing – masing bidang	aktivitas pada dokumen rencana aksi terdapat pada tabel 3.2 Rumusan Perubahan	6Lzm6EFdhIAaZ711f-0G00c/view?usp=sharing 3. https://drive.google.com/file/d/1UCWP8cd-6Lzm6EFdhIAaZ711f-0G00c/view?usp=sharing
9	Memanfaatkan evaluasi kinerja dalam penyesuaian aktivitas dalam rangka akuntabilitas kinerja	Pemanfaatan evaluasi kinerja TA. 2023 telah dipergunakan dalam dokumen rencana kerja 2023 sebagai dasar dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun 2023	11 November 2024	11 November 2024	Pemanfaatan evaluasi kinerja TA. 2023 telah dipergunakan dalam dokumen rencana kerja 2023 sebagai dasar dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun 2023 yang terdapat dalam Tabel 2.1	Dokumen Rencana Kerja 2023 terdapat dalam Tabel 2023 dan Rekapitulas Pelaksanaan Masi Tahun 2024 Provinsi Banten	https://docs.google.com/document/d/1qc5DO7bAZWz7YEVbYmDFpWqHlcoSmbvic_FP8pTQJRI/edit?usp=sharing
5.	Informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas pada rencana aksi melalui dokumen	Informasi dalam laporan kinerja yang tercantum dalam LKJIP 2023 pada Bab IV Penutup di bagian 4.2 Saran dan Rekomendasi untuk tahun berikutnya	11 November 2024	11 November 2024	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dan Rekomendasi untuk tahun berikutnya	Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 pada Bab IV Penutup di bagian 4.2 Saran	https://drive.google.com/file/d/1owhELPI_WXhmB2bu8SJcuKhLiMXmvHVf/view?usp=sharing
	perubahan rencana aksi serta penyesuaian					dan Rekomendasi untuk tahun	

	perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya					berikutnya	
6.	Pelaksanaan evaluasi melibatkan seluruh bidang, baik triwulanan maupun evaluasi mandiri AKIP disertai dengan laporan data kinerja bidang	Dinas Pariwisata telah melakukan evaluasi secara rutin (tiwulanan) yang melibatkan seluruh bidang	11 November 2024	11 November 2024	Dinas Pariwisata telah melakukan evaluasi secara rutin (tiwulanan) yang melibatkan seluruh bidang	Laporan Evaluasi Rapat Internal Triwulanan 2023	https://drive.google.com/file/d/1LzLJQdGE-iQZEIwBz5cKZtLxv7H8saKN/view?usp=sharing
7.	Menggunakan teknologi informasi	Dinas Pariwisata telah menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja individu dan kegiatan	11 November 2024	11 November 2024	Penggunaan teknologi informasi telah dipergunakan melalui aplikasi SIMRAL yang selanjutnya mengalami perubahan nama menjadi aplikasi SIMAKIP	1.Laporan Kinerja SIMAKIP 2.Laporan e kinerja / SKP	1. https://drive.google.com/file/d/1selVomnYNHJmNEdkMXtBBTch-MTuhWXh/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1SLAHJ6IQD50TIC930N7B_-8Fny8TDyqu/view?usp=sharing
8	Menyusun laporan kinerja masing – masing	Masing – masing dilingkungan Dinas Pariwisata telah menyusun laporan kinerja 2023 yang telah dimasukkan ke dalam laporan SIMAKIP 2023	11 November 2024	11 November 2024	Masing – masing dilingkungan Dinas Pariwisata telah menyusun laporan kinerja 2023 yang telah dimasukkan ke dalam laporan SIMAKIP 2023	Laporan Kegiatan 2023	1. https://drive.google.com/file/d/110fU8HmlLEaedUMmEMoNcALX6t36GD8P/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1UCWP8cd_-

		sebagai bentuk laporan prosiding yang harus disampaikan di akhir tahun pelaksanaan kegiatan oleh masing – masing bidang			sebagai bentuk laporan prosiding yang harus disampaikan di akhir tahun pelaksanaan kegiatan oleh masing – masing bidang		6Lzm6EFdhlAaZ711f-0G00c/view?usp=sharing 3. https://drive.google.com/file/d/1UCWP8cd_-6Lzm6EFdhlAaZ711f-0G00c/view?usp=sharing
9	Memanfaatkan evaluasi kinerja dalam penyesuaian aktivitas dalam rangka akuntabilitas kinerja	Pemanfaatan evaluasi kinerja TA. 2023 telah dipergunakan dalam dokumen rencana kerja 2023 sebagai dasar dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun 2023	11 November 2024	11 November 2024	Pemanfaatan evaluasi kinerja TA. 2023 telah dipergunakan dalam dokumen rencana kerja 2023 sebagai dasar dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun 2023 yang terdapat dalam Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Banten	Dokumen Rencana Kerja 2023 terdapat dalam Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Banten	https://docs.google.com/document/d/1qe5DO7bAZWz7YEVbYmDFpWqHlcoSmbvic_FP8pTOJRI/edit?usp=sharing

1.8 Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Maksud Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Isu – isu Strategis
- 1.6 Proses Bisnis
- 1.7 Cascading Kinerja
- 1.8 Tindak Lanjut LHE SAKIP
- 1.9 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Perubahan 2023 – 2026
- 2.2 Rencana Renja 2024
- 2.3 Perjanjian Kerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja 2024
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
 - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja 2024 dengan 2023 dan beberapa tahun Terakhir
 - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 - 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 - 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi Yang telah dilakukan
 - 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Inovasi

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran dan Rekomendasi

Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang/UPT	-	2	1	-	-	-	3
4	Kepala Subbag	-	-	1	-	-	-	1
5	Fungsional	-	10	5	-	-	-	15
6	Staf / Pelaksana	-	4	13	8	-	7	32
7	Pramubakti Administrasi	-	2	12	-	1	14	29
TOTAL		0	19	33	8	1	21	84
% terhadap Jumlah Pegawai		0	22,62	39,29	9,52	1,19	25,00	100,00

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pariwisata, 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Banten didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 33 orang (39,29%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 19 orang (22.62%), D3 8 orang (9.52%), SLTA sebagai staf pelaksana dan pramubakti administrasi sebanyak 21 orang (25.00%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; namun untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1	ASET	
11	ASET LANCAR	
1101	Kas dan Setara Kas	0,00
110101	Kas di Kas Daerah	0,00
110102	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
110104	Kas di BLUD	0,00
110105	Kas Dana Bos	0,00
110106	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
110107	Kas Lainnya	0,00
110108	Setara Kas	0,00
1102	Investasi Jangka Pendek	0,00
1103	Piutang Pajak Daerah	0,00

1104	Piutang Retribusi Daerah	0,00
1105	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00
110605	Piutang Jasa Giro	0,00
110616	Piutang Pendapatan BLUD	0,00
110621	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00
1107	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00
110701	Piutang Dana Perimbangan	0,00
110702	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	0,00
1108	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00
110801	Piutang Bagi Hasil	0,00
110802	Piutang Bantuan Keuangan	0,00
1109	Piutang Lainnya	0,00
110901	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00
110902	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	0,00
110903	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
110904	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00
110905	Uang Muka	0,00
1110	Penyisihan Piutang	0,00
111001	Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00
111002	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
1111	Beban Dibayar Dimuka	33.648.551,25
111101	Beban Dibayar Dimuka	33.648.551,25
1112	Persediaan	35.518.290,00
111201	Barang Pakai Habis	35.518.290,00
111202	Barang Tak Habis Pakai	0,00
111203	Barang Bekas Dipakai	0,00

No	Uraian	Jumlah
1113	Aset untuk dikonsolidasikan	0,00
111301	RK SKPD	0,00
11130101	RK SKPD	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		69.166.841,25
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1201	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	0,00
1202	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00
120201	Penyertaan Modal	0,00
120202	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00
14	ASET TETAP	
1401	Tanah	0,00
1402	Peralatan dan Mesin	13.150.366.417,20
1403	Gedung dan Bangunan	25.578.894.448,00
1404	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	519.068.471,09
1405	Aset Tetap Lainnya	106.510.000,00

1406	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
1407	Akumulasi Penyusutan	(24.569.689.321,93)
140701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.316.542.396,56)
140702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13.205.230.716,53)
140703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(28.116.208,84)
140704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(19.800.000,00)
JUMLAH ASET TETAP		14.785.150.014,36
15	PROPERTI INVESTASI	
1501	Properti Investasi	0,00
1502	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00
16	DANA CADANGAN	
1601	Dana Cadangan	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00
17	ASET LAINNYA	
1701	Tagihan Jangka Panjang	0,00
1702	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
1703	Aset Tak Berwujud	120.379.500,00
1704	Aset Lain-lain	257.305.200,00
1705	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(40.965.937,50)
1706	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(61.324.000,01)
1708	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		275.394.762,49
JUMLAH ASET		15.129.711.618,10
2	KEWAJIBAN	
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
2102	Utang Bunga	0,00
2103	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2024 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan OPD di bidang Pariwisata.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan, Unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai empat tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar dibawah ini.

Penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja OPD Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Berdasarkan RPD Provinsi Banten tahun 2023–2026, maka visi dan misi RPD, Sebagaimana Provinsi Banten tahun 2023–2026 adalah:

“BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Sementara itu misi Provinsi Banten periode 2023–2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

TUJUAN DAERAH/TUJUAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN
-------------------------	-----------	-------------------------------

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

2.1 Perencanaan Strategis Perubahan 2023 – 2026

Sesuai cascade kinerja, Dinas Pariwisata Provinsi Banten mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah untuk meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan pertumbuhan pariwisata, Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun adalah:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN DAERAH/TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN DAERAH				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
2	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan : Orang)	19.105.640	20.060.922	21.063.968	22.117.167	23.223.025

2.2 Rencana Kinerja 2024

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

VISI : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing Secara Merata Dan Berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi)	Peningkatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata,
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana dan Akses Pasar Produk Ekonomi Kreatif,	Peningkatan Sarana dan Parasarana serta Kualitas Produk Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan Kompetensi Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan Kualitas dan Memperluas Cakupan Penyebaran Promosi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Layanan Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
MISI 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	ningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	ningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pariwisata	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

**Arah Kebijakan Tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tahun 2023 – 2026**

Tabel 2.2.1 Arah Kebijakan

No.	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan			
		2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
2	Peningkatan Sarana dan Parasarana serta Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi
3	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf
4	Peningkatan Layanan Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Pembangunan Pusat Ruang Kreatif 2. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Pembangunan Pusat Ruang Kreatif 2. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif
5	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

Struktur Anggaran Program dan Kegiatan APBP Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan APBDP Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2024 baik sasaran utaman maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut dibawah ini :

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran 2024

Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan APBP Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS (Indikator Kinerja Program/Kegiatan)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	4
I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80 Nilai	49.266.176.500
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan : Orang)	21.063.968	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	19.385.934.300
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	127340000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	55110000

NO	SASARAN STRATEGIS (Indikator Kinerja Program/Kegiatan)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		Perangkat Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	18.240.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	29.490.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	15.807.424.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	15.408.899.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	366.525.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6,000,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	6,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	6,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS (Indikator Kinerja Program/Kegiatan)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6,000,000
		Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.000.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	500.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	500.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 %	44.500.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	500,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	500,000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	500,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	15,000,000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	103 Orang	28,000,000
5	Administrasi Umum Perangkat	Persentase Ketercapaian Kegiatan	100 %	582.790.000

	Daerah	Administrasi Umum perangkat daerah		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	9,634,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	272.670.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	31.540.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	43.964.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.510.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	164.807.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3,000,000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	46.665.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	205.137.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	205.137.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.630.921.900
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	401.021.900
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	2.229.900.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	547.500.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	7 Unit	195.500.000

		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	175.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152 Unit	102.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	75.000.000
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	100 Persen	20.739.843.200
		Rata-Rata Lama inap	1,72 Hari	
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	100 %	6.400.610.000
		Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	23 Lokasi	6.400.610.000
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	11.174.500.000
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Dokumen	450.000.000
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	16 Unit	3.000.000.000
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	4.000.000.000

		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	6570 Orang	3.697.500.000
3	Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 %	3.079.420.300
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	741.010.000
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5 Lokasi	1.950.723.200
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) DaerahProvins	100 %	500.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	4 Usaha	200.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	30 Usaha Pariwisata	300.000.000
III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	100%	1.400.000.000
		Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rp. 5.248.739	

1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100 %	1.365.584.000
		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	3 Dokumen	1.100.000.000
2	'Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	300.000.000
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	20 Orang	150.000.000
		Perlindungan Hasil Kreativitas	1 Dokumen	150.000.000
IV	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jumlah Promosi Wisata	100 %	5.988.124.377
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	5 %	
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	5.988.124.377
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri.	4 Dokumen	3.388.124.377
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	500.000.000
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	2.100.000.000
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 %	2.504.700.000

1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 %	2.004.700.000
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	120 Orang	200.000.00
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1834 Orang	845.682.000
		Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	390 Orang	500.000.000
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 %	500.000.000
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	180 Orang	200.000.000
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	150 Orang	300.000.000
JUMLAH				50.580.280.477

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang merepresentasikan kinerja instansi, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan : Orang)	Orang	21.063.968	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	80	

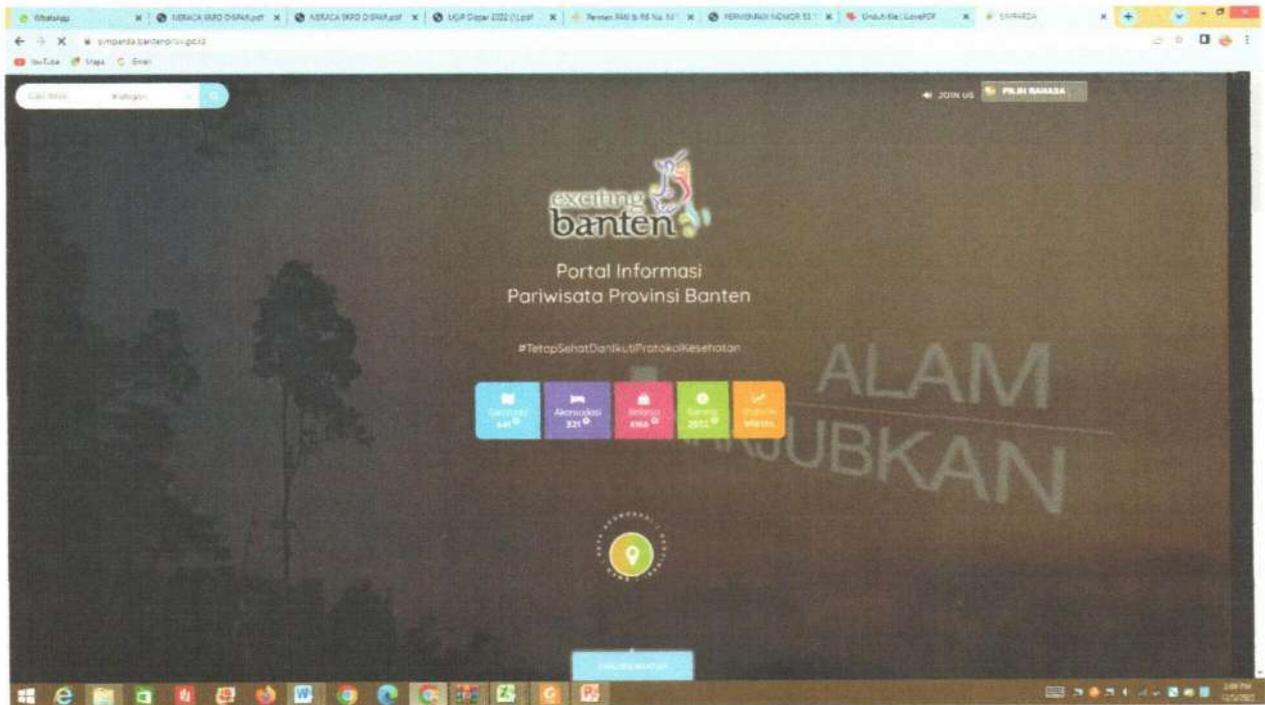
Keterangan :

Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pematuhirannya	Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	20,739,843,200
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1,400,000,000
Program Pemasaran	Program Pemasaran	5,988,124,377
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,504,700,000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,947,612,900
Jumlah Anggaran		50,580,280,477

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah aplikasi Simparda.bantenprov.go.id yang mengintegrasikan perhitungan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara.

Gambar 2.5 Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun anggaran 2023

PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome*.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja	Kode / Warna
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50 S	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran / Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi	SKPD Penanggung Jawab	Bidang Urusan
		2024	2024	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	70	78,15	111,64 %	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Kepala Dinas
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	21.063.968	22.465.192	106,65 %		Sekretaris
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Definisi Operasional : Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat / target yang telah ditetapkan (100%)	100 %	100 %	100 %		

Sasaran / Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi	SKPD Penanggung Jawab	Bidang Urusan
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	100 %	100 %	100 %		Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata
	Rata-Rata Lama inap	1,72 Hari	1,37 Hari	79.65 %		Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rp. 5.248.739)	5.248.739	3.172.274	60.44 %		Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
Program Pemasaran	Persentase Jumlah Promosi Wisata (100 %)	100 %	100 %	100 %		Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (100 %)	100 %	100 %	100 %		

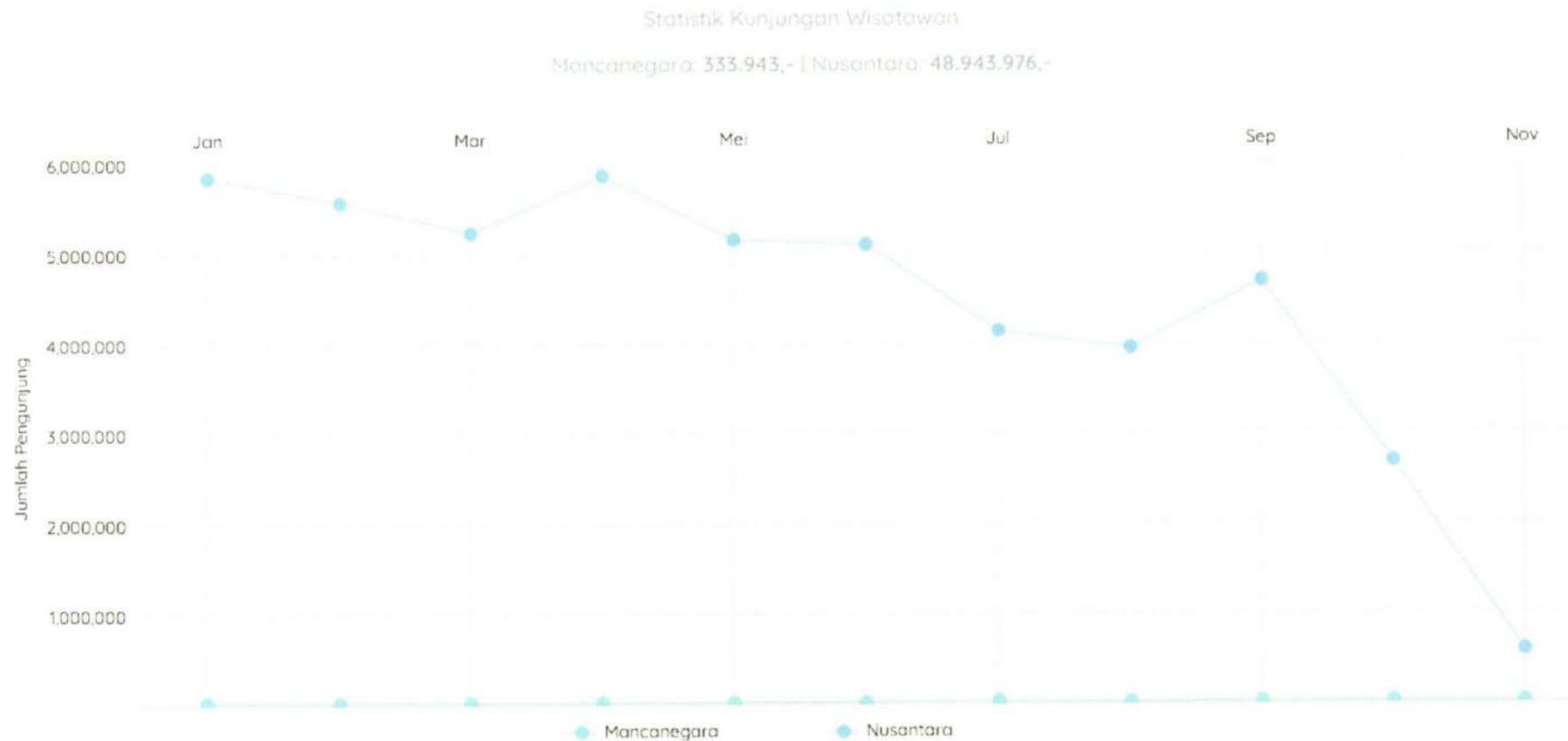
Keterangan :

*Jumlah kunjungan wisatawan data kunjungannya masih berjalan s.d tanggal 10 Januari 2025

*data lama inap berdasarkan data BPS Provinsi Banten 10/02/36/Th.XIX,3 Februari 2025

sasaran pertama kurun waktu Januari – Desember 2024 sebagai berikut :

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN



Jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2024 pada awal bulan desember memiliki penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini disebabkan belum masuknya masa libur bersama (*peak season*) pada hari libur Natal dan Tahun Baru, dimana jika melihat dari tahun ke tahun umumnya akan mengalami peningkatan secara signifikan, namun begitu jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai 102,29 % dari target

Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini memiliki peran penting terhadap peningkatan daya saing pariwisata di Banten terutama dalam pemenuhan aspek strategis dalam penataan dan pengembangan destinasi pariwisata meliputi ; amenitas, atraksi dan aksesibilitas sebagai penopang dalam peningkatan kunjungan wisatawan.

Fokus pembangunan daya tarik kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten di tetapkan pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Melalui pengembangan daya tarik yang terstruktur ini diharapkan pengembangan pariwisata dapat berjalan dan berkelanjutan (sustainable progam) melalui pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi (KPP) serta destinasi pariwisata provinsi (DPP)

Sebagai lokomotif dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, pada tahun 2023 Bidang pelaksana kegiatan ini yang menaungi 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3. Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Telah berhasil melaksanakan kegiatan penataan dan pengembangan daya tarik wisata dengan persebaran destinasi yang mengacu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) dengan target dan realisasi indikator sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini :

Capaian Target dan Realisasi 2024

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	20	20 %	100 %
	Rata-Rata Lama inap	1,72 Hari	1,37 Hari	79.65 %

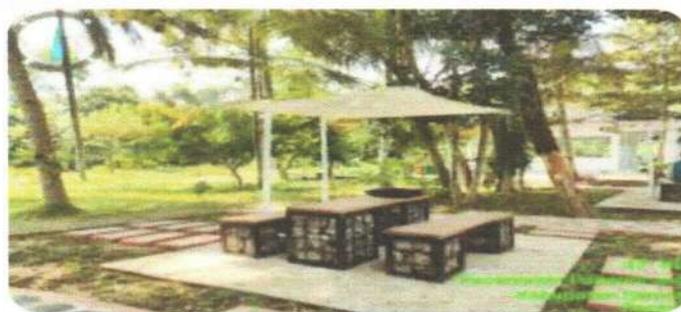
Adapun keberhasilan penataan dan pengembangan destinasi pariwisata ditunjang dengan adanya pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) yang disusun dalam rencana induk pengembangan pariwisata provinsi (Ripparprov) sehingga memudahkan PPTK melakukan rencana pengembangan berdasarkan roadmap dalam dokumen tersebut.

Dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan destinasi wisata di Provinsi Banten diantaranya ;

1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi yang dipusatkan pada cluster wilayah pengembangan strategis dengan total 23 pengembangan lokasi KSPP berjalan dengan realisasi 100 % melalui penataan penyediaan detail rencana kawasan sebagai berikut :

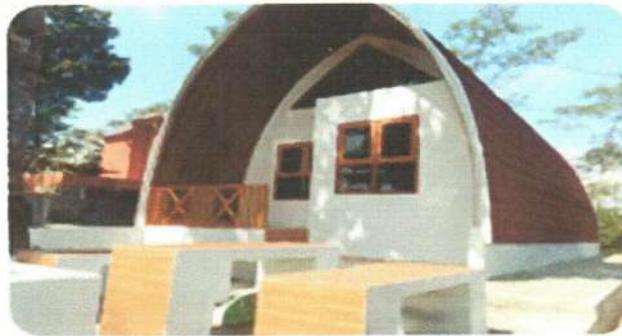
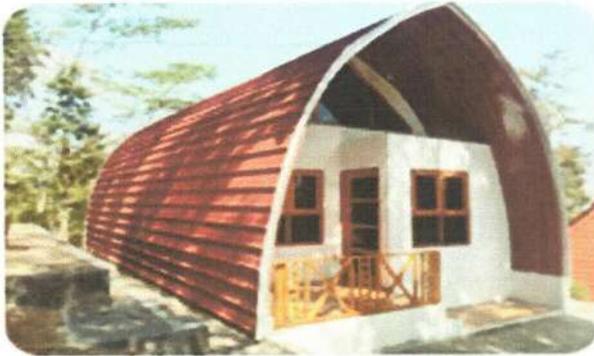
DOKUMENTASI

LANDMARK POKDARWIS MACAN KETAWA DESA PADARINCANG KAB. SERANG DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TA 2024



2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi telah melakukan penyusunan terhadap 4 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan capaian 100 % melalui penataan dan pengembangan kawasan kawasan sebagai berikut :
3. Pengelolaan Destinasi Wisata telah melakukan penyusunan terhadap 2 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan capaian 100 % melalui penataan dan pengembangan kawasan kawasan sebagai berikut :

DOKUMENTASI
HOMESTAY DESA HEGARMAHAH
KAB. LEBAK
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
TA 2024



4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi telah melakukan 3 kali pembinaan dan fasilitasi standarisasi industri kepada 24 usaha industri dengan capaian 100 % melalui pembinaan dan fasilitasi sebagai berikut :

DOKUMENTASI SOSIALISASI HAKI OLEH KONSULTAN HAKI



Seluruh kegiatan pada program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi ditujukan untuk mencapai target sasaran program yaitu penataan dan pengembangan destinasi wisata dengan target 20 % setiap tahunnya, hasil pengembangan sebaran kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PENATAAN DESTINASI PARIWISATA



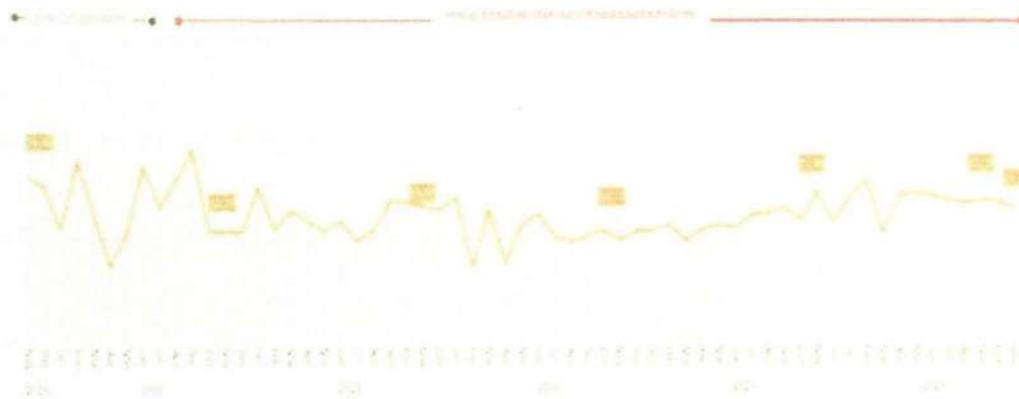
Data pengembangan destinasi di 8 Kab/Kota

Berdasarkan data diatas dapat kita simpulkan bahwa perkembangan destinasi lebih dominan di kasawan strategis wilayah Kabupaten Lebak. Berdasarkan rencana dan realisasi pengembangan pada tahun 2023 telah dibangun sebanyak 13 Kawasan sehingga rencana pengembangan 20 % untuk tahun ini tercapai sebanyak 20 % sehingga pencapaian penataan destinasi menjadi **100 %** dengan predikat “Sangat Baik”

Sehingga target capaian pada penataan dan pengembangan destinasi pariwisata provinsi banten sebesar 100 %. Faktor dominan penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah adanya komunikasi dan persepsi yang sama antara pemangku kepentingan dalam mengembangkan daya tarik unggulan d masing – masing daerah yang terlihat dengan adanya permohonan administratif bantuan dari masing – masing kelompok sadar wisata (pokdarwis) di Provinsi Banten.

Tabel 6 TPK Hotel Non Bintang di Banten, November 2024

Kategori Jumlah Kamar	TPK (%)			Perubahan November'24 thd November'23 (year-on-year) (poin persen)	Perubahan November'24 thd Oktober'24 (month-to-month) (poin persen)
	November 2023	Oktober 2024	November 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelompok Kamar <10	13,55	13,30	12,89	-0,66	-0,41
Kelompok Kamar 10-24	20,54	15,79	15,58	-4,96	-0,21
Kelompok Kamar 25-40	23,43	19,59	20,34	-3,09	0,75
Kelompok Kamar >40	26,32	28,08	26,00	-0,32	-2,08
TPK Non Bintang	21,99	20,38	19,37	-2,62	-1,01



Gambar 7 Perkembangan TPK Hotel Non Bintang di Banten (persen), 2019-2024

4 Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Hotel Berbintang

Pada bulan November 2024, RLMT gabungan (asing dan Indonesia) pada hotel bintang di Banten tercatat selama 1,30 hari atau turun 0,02 hari dibandingkan bulan Oktober 2024. Penurunan RLMT ini disebabkan turunnya RLMT pada kelas hotel bintang satu, bintang empat dan bintang lima, masing-masing selama 0,09 hari, 0,08 hari dan 0,47 hari. .

Sementara itu, dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2023, RLMT gabungan November 2024 mengalami penurunan 0,20 hari. Penurunan RLMT ini disebabkan oleh turunnya RLMT pada seluruh kelas hotel bintang.

Berdasarkan berita resmi statistik BPS Perwakilan Banten yang disampaikan informasi perkembangan terkait rata – rata lama menginap tamu (asing dan nusantara) di Provinsi Banten untuk s.d Bulan November 2024 terhitung **1.37** hari sehingga target capaian dari 1.72 hari adalah sebesar **79.65 %**. dengan predikat “**Sedang**”

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki peran penting terhadap peningkatan Pelaku Industri pariwisata yang profesional dalam pemenuhan kapasitas dan kapabilitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi ; fasilitasi dan pembinaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diarahkan kepada pendudukan pengembangan pariwisata sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Melalui kegiatan ini diharapkan bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat unggul dan berdaya saing dalam menapaki dunia kepariwisataan. Bidang pelaksana kegiatan ini pada tahun 2023 menaungi 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Bidang ini telah berhasil melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan rencana dan realisasi capaian indikator sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini :

Capaian Target dan Realisasi 2024

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rp. 5.248.739)	5.248.739	3.172.274	60.44 %

Terinformasikan bahwa capaian 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 terkait pencapaian Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan mengalami peningkatan pengeluaran sebesar Rp. 825.167 dibandingkan tahun 2023 sehingga capaian kinerja 2024 adalah **60.44 %**

Keterangan :

Rata – rata pengeluaran di dapat dari Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2024

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan yaitu ;

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang dipusatkan pada cluster wilayah pengembangan strategis dengan total 6 unit ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif di Provinsi Banten telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian realisasi 100 % dengan keterangan sebagai berikut :



2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan guna menunjang ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi para pelaku ekonomi kreatif dengan target 1 Dokumen telah terlaksana dengan capaian realisasi mencapai 100%

**DOKUMENTASI RAPAT PERSIAPAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

pencapaian output program Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kaekayaan Intelektual selaras dengan indikator kinerja utama yaitu rata – rata pengeluaran, berikut kami tampilkan target pencapaian atas kinerja tersebut :

RATA – RATA PENGELUARAN

NAMA DATA	NILAI
Akomodasi/penginapan	734.000
Transportasi	673.263
Makanan/minuman	568.988
Suvenir	263.923
Belanja	264.975
Jasa hiburan/rekreasi	234.063
Paket wisata	122.725
Pemandu	58.201
Lain-lainnya	252.138
	3.172.274

Sumber data :

Rata – rata pengeluaran di dapat dari Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2024

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh informasi bahwa rata – rata pengeluaran wisatawan yang terdiri dari 2 komponen yaitu :

1. Wisatawan Inbound
2. Wisatawan Outbond

Dimana konsultan PT Sketsa Negeri Mandiri telah melakukan penyusunan dokumen neraca satelit pariwisata daerah (Nesparda) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2023 yang diperoleh dari pengolahan data primer hasil survey 2022, data studi literatur Nesparda 2015 dan 2021 serta simulasi dan perhitungan matematis diperoleh hasil Dampak belanja pariwisata di Provinsi Banten pada tahun 2022 dengan rata-rata sebesar **Rp. 2.347.107,-** pada tahun 2024 (yang dilaporkan pada dokumen Nesparda 2023)

Sehingga target pengeluaran rata – rata wisatawan (nusantara dan mancanegara) berdasarkan target sebesar **Rp. 5.248.739** tercapai **Rp. 3.172.274** sehingga jika dihitung prosentasenya tercapai **60.44 %** dengan predikat “Rendah”

Program Pemasaran

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemasaran ini memiliki peran penting terhadap peningkatan promosi, kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara) serta investasi di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; sarana dan prasarana promosi, fasilitasi event dalam dan luar daerah serta aktivitas promosi media sosial kekinian sebagai sarana untuk memperkenalkan daya tarik wisata di Provinsi Banten.

Fokus pembangunan pariwisata diarahkan kepada wisatawan nusantara dan mancanegara melalui pemanfaatan potensi dan daya tarik yang dimiliki dan diarahkan untuk meningkatkan perekonomian di Banten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan kewasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Bidang Pemasaran ini telah berhasil melaksanakan pengembangan promosi pariwisata dengan rencana dan realisasi capaian indikator sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini :

Capaian Target dan Realisasi 2024

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program Pemasaran	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	5	5	100
	Prosentase jumlah promosi wisata	100	100	100

Terinformasikan bahwa capaian 2024 terhadap persentase pertumbuhan jumlah wisatawan di tahun 2023 mengalami kesesuaian target sehingga capaian target dan realisasi 2024 adalah 100 % sementara untuk persentase jumlah wisata tetap 100 %

Terinformasikan bahwa capaian 2024 terhadap persentase pertumbuhan jumlah wisatawan periode akhir renstra 2026 mengalami kesesuaian target sehingga capaian persentase pertumbuhan jumlah wisatawan terhadap akhir renstra 2026 adalah 100 % sementara untuk untuk persentase jumlah wisata mencapai **100 %** kategori "Sangat Baik"

Keterangan :

Rata – rata pertumbuhan wisatawan ini diukur dari selisih target dan realisasi kunjungan yang kemudian dikonversi hasilnya menjadi persentase (%)

Berikut kegiatan yang menunjang pencapaian terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan serta prosentase jumlah promosi wisata diharapkan kunjungan wisatawan maupun kerjasama antar stakeholder (B2B) dapat terealisasi dengan optimal. Guna mendukung target capaian tersebut bidang pemasaran pada tahun 2024 memiliki 1 kegiatan yaitu :

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan diantaranya ;

Fasilitasi Seba Baduy



Famtrip Kab/Kota



Event / Harvesting BBI dan BBWI

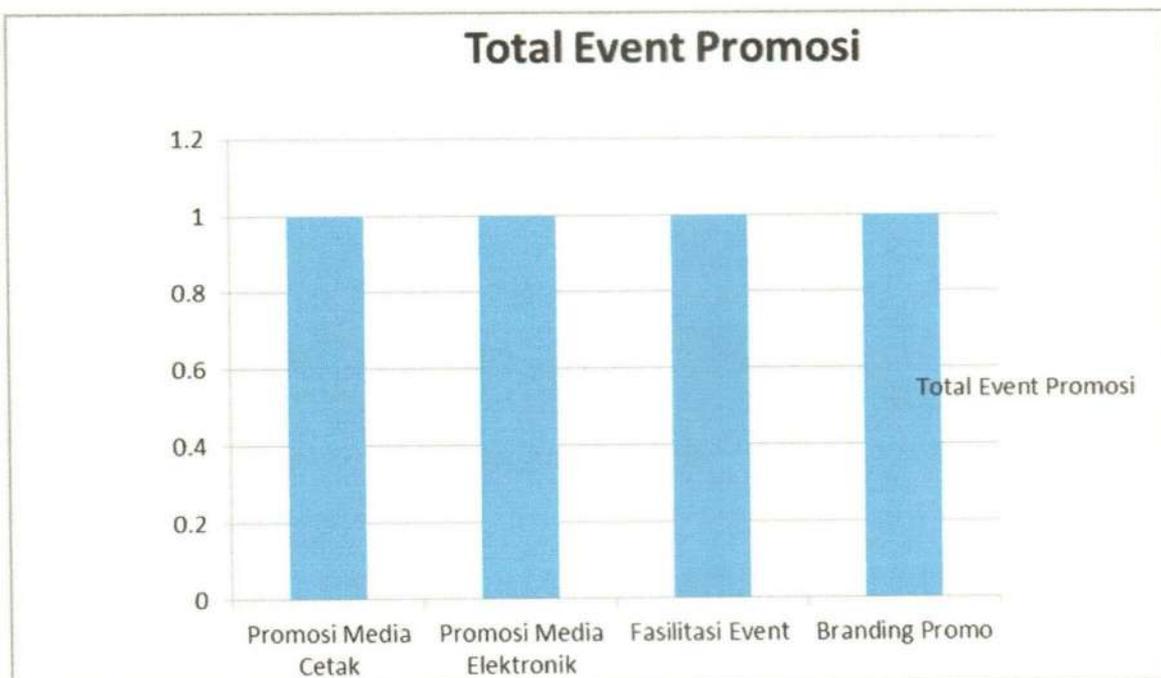


TIM OCS
Online Campaign Sosial



Seluruh kegiatan pada program Pemasaran dilaksanakan dalam rangka mencapai 5 dokumen event kegiatan promosi wisata dimana pada tahun 2024 target tersebut sudah tercapai sehingga capaian programnya mencapai 100 % hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 3.2.3 I



Kegiatan promosi event yang dilaksanakan oleh Program Pemasaran Pariwisata di

Bidang Pemasaran pada Tahun 2024 telah melakukan sebanyak 4 kali (dokumen) pelaksanaan promosi pariwisata yang terdiri dari :

1. Promosi Media Cetak
2. Promosi Media Elektronik
3. Fasilitasi Event
4. Branding Promo

Seluruh kegiatan promosi ini ditujukan untuk menunjang kegiatan pengembangan daya tarik (destinasi) pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Penyebaran event kegiatan promosi difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang didasarkan pada rencana induk pengembangan pariwisata provinsi (Ripparprov).

Sementara target promosi di tahun 2024 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah sebesar 5 % dari 4 event promosi sehingga capaian **100 %** dengan predikat "Sangat Baik"

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program ini memiliki peran penting terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; Pemberian sertifikat, peningkatan peran masyarakat dalam rangka pengembangan kemitraan pariwisata dan fasilitasi pengembangan kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan kepada wisatawan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Pelaksanaannya sesuai amanat perundang – undangan dimana SDM yang diberikan pembekalan maupun pelatihan adalah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tingkat lanjutan dimana bagi SDM yang baru harus melalui tahapan pembinaan dan pelatihan di Dinas Pariwisata Kab/Kota sehingga pemanfaatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan perekonomian masyarakat di Banten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Capaian Target dan Realisasi 2024

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2624 Orang	2624 Orang	100

Terinformasikan bahwa capaian 2024 terhadap persentase SDM yang memiliki sertifikat di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif mencapai **100 %** dari yang ditargetkan di 2024 predikat “Sangat Baik”

Berikut kegiatan – kegiatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi profesional dan mandiri serta mampu menjadi pelopor bagi masyarakat disekitar destinasi / kawasan pariwisata untuk bersama – sama mengembangkan potensi wisatanya. Adapun kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

DOKUMENTASI KEGIATAN

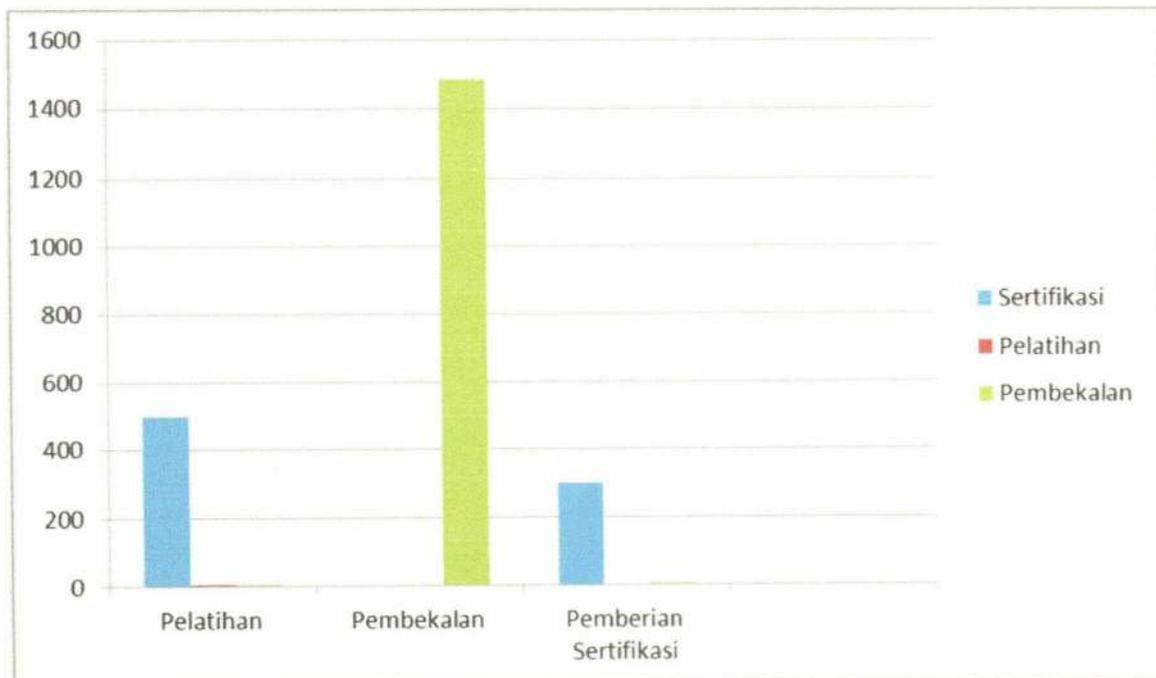




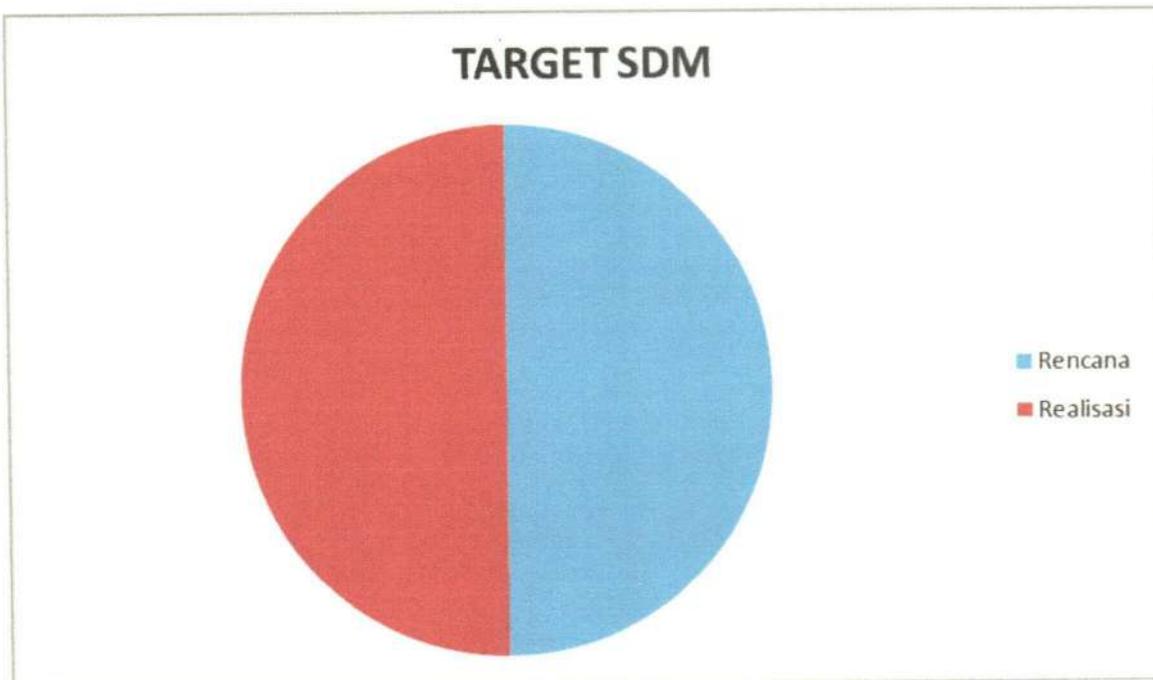


Dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan yaitu ;

Share Kontribusi Kegiatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



TARGET DAN RENCANA PENGEMBANGAN SDM



Berdasarkan share kontribusi dan penargetan SDM di Tahun 2023 bahwa pencapaian indikator sasaran dengan target 2285 pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina telah tercapai sehingga capaian kinerjanya mencapai **100 %** dengan predikat "Sangat Baik"

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian seluruh program dan kegiatan	100 %	100%	100
	Definisi Operasional : Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat / target yang telah ditetapkan			

Terselenggarakan program penunjang urusan pemerintahan daerah ditopang oleh kegiatan – kegiatan dan sub – sub kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan dan pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Sekretaris Dinas selaku PPTK pada program penunjang urusan pemerintahan daerah telah nyata – nyata melakukan peran kelembagaannya yang berfungsi sebagai koordinasi, konsultasi kepada masing – masing bidang dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Ketersediaan pelayanan umum, administrasi kepegawaian, perencanaan hingga pengelolaan anggaran keuangan lembaga / dinas yang baik di tahun 2024, hal ini membantu para PPTK hingga staf di Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa mengkhawatirkan tentang keperluan dan kelengkapan pelaksanaan kegiatannya.

dirasa wajar jika ketercapaian kinerja program ini sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pengukuran kinerja SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan bobot nilai 78,15 dengan kategori BB (Baik) dengan asumsi seluruh penyelenggaraan sebagaimana keterangan diatas telah dipenuhi

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja SAKIP, Sekretariat telah melakukan beberapa kegiatan baik yang menunjang maupun mendukung capaian program dan kegiatan secara langsung, dengan eviden sebagai berikut ;

Forum Renja 2026 (Sekretariat)

Tersusunnya 2 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah yaitu :

- a. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2025
- b. Dokumen Peta Bisnis Proses 2023 dan Penyempurnaan Rencana Strategis 2023 -2026
- c). Dokumen Data Sektoral

Rapat Internal (Evaluasi kegiatan di Sekrertariat)

Terselenggaranya rapat evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten guna mensinergikan kegiatan dan mengantisipasi kendala dan permasalahan

Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan (Sub Bagian Umum dan Kependidikan)



Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi ASN dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Rapat Pengelolaan Anggaran Keuangan (Sekretariat)



Terlaksananya rapat pengelolaan keuangan anggaran yang ditujukan untuk menunjang dan meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan memenuhi SAP (Standar Akutansi Pemerintah)

Pemeliharaan Kendaraan**Pemeliharaan Gedung**

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung kantor yang dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria / Kode	Target Akhir RPJMD
			2023	2023	2024	2024	2024	2023	
1	2	3	4	5	4	5			7
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Jumlah	20.060.922	25.664.013	21.063.968	22.465.192	106,65 %	Sangat Baik	23.223.025
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	80	81.25	70	78,15	111.64 %	Sangat Baik	80,00

Sumber data :

1. LHE AKIP Evaluasi Inspektorat 2023
2. Kunjungan Wisatawan Kab/Kota melalui Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah (SIMPARDA)

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026
			2024	2024	2024		
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	60,817,391	21.063.968	22.465.192	106,65 %	23.223.025	92,78 %

Berdasarkan data tersebut capaian ini terlihat bahwa posisi s/d November 2024 adalah sejumlah 19.410.605 orang wisatawan nusantara sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 318.650 orang sehingga jumlah total kunjungannya menjadi 19.410.605 orang sehingga pencapaian prosentase kunjungannya sebesar 92,15 %

NO	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023
			2024	2024	2024		
2	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80 (A)	70	78,15	111.64 %	80	87,50 %

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Secara umum perbandingan antara kinerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten belum dapat disandingkan secara konkrit hal ini disebabkan adanya luas wilayah dan kewenangan yang berbeda berdasarkan aturan dan perundang – undangan yang berlaku pada masing – masing K/L/D/I namun begitu melalui pendekatan keterkaitan program dan kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan rencana pemerintah daerah (RPD) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 dapat kami sandingkan keterkaitan antara program dan kegiatan prioritas daerah dan prioritas nasional sebagai tabel berikut :

DINAS PARIWISATA (DAERAH)				DINAS PARIWISATA (DAERAH)		
NO	PRIORITAS DAERAH / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET
Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		
1	Program Pengembangan Destinasi	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi	20 (%)	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill dan Industrialisasi	Kontribusi PDB Pariwisata	(8.9.1*) %
2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kaekayaan Intelektual	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	25 (%)	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill dan Industrialisasi	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp (Triliun)
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 (orang)	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill dan Industrialisasi	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	(8.9.2*) (Juta Orang)

Sumber lampiran RPD tabel 6.5 (Pergub 3 Tahun 2022)

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan

Sasaran pertama “Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)”

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)”	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)”	Jumlah Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun N Jumlah Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun N x 100

Sumber data kunjungan wisatawan diperoleh dari *counter part* masing – masing Kab/Kota di Provinsi Banten yang diberikan akses untuk melakukan perhitungan kunjungan wisatawan mancanegara oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten. *counter part* ini berasal dari petugas atau pegawai dan atau pengelola destinasi wisata dari Dinas Pariwisata ataupun pengelola obyek yang tersebar di 8 Kab/Kota dan telah diberikan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai pemberi tugas.

Analisis ketercapaian kinerja sasaran pertama “Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)” adalah sebagai berikut :

1. Prosentase capaian diangka 106,65 % dimana angka ini merupakan angka final yang terkumpul berdasarkan data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dari Kab/Kota se Provinsi Banten
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kunjungan disandingkan mengalami penurunan secara jumlah namun secara kualitas hasil ini lebih baik karena telah dipilah berdasarkan kategori hanya dari kunjungan wisata ke obyek wisata.
3. Ketercapaian kunjungan wisatawan ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pihak swasta, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku UMKM serta masyarakat Banten telah berjuang mengoptimalkan peran dan fungsinya masing – masing dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan.
4. Terdapat program *sustainable development goals* (SDG's) pada sector pariwisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dapat dijalankan dengan baik oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagaimana yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Bidang Destinasi Pariwisata.

5. Berjalannya output seluruh aktifitas program dan kegiatan yang dipengaruhi adanya pertimbangan perencanaan yang baik sehingga dapat terarahkan program dan kegiatan yang menunjang target utama yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan di Banten.

Faktor Penghambat belum tercapainya rata – rata pengeluaran dan lama inap yang mendukung sasaran strategis pertama “Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara” adalah sebagai berikut :

1. Adanya faktor cuaca yang mempengaruhi wisatawan khawatir berkunjung ke obyek wisata alam (Pantai, Gunung dsb)
2. Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih belum bisa bersaing baik dari segi rasa (*flavour*) dan harga (*price*) serta pemasaran (*outlet*) produk lokal yang belum optimal di destinasi kawasan strategis pariwisata provinsi Banten.
3. Daya beli masyarakat yang berkurang karena adanya inflasi yang mempengaruhi ekonomi
4. Terkait ketidaktercapaian rata – rata pengeluaran disebabkan karena belum terakomodirnya seluruh komponen usaha pariwisata dan ekonomii kreatif dalam intervensi kegiatan yang diampu pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
5. Terkait ketidaktercapaian Lama inap selain karena adanya pengaruh cuaca dan daya beli juga adanya faktor daya tarik / destinasi wisata di Provinsi Banten bagi wisatawan dianggap belum begitu menarik sehingga lama inap menjadi tidak optimal

Tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai sekaligus meningkatkan rata – rata pengeluaran dan lama inap adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan BMKG dan stakeholder terkait untuk memantau faktor cuaca yang dapat mempengaruhi minat wisatawan
2. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan produk mulai dari mengolah rasa menentukan harga hingga menjalin kerjasama dengan pelaku UMK /UMKM Lainnya yang telah memiliki tempat strategis
3. Berkoordinasi dengan Bank BI Perwakilan Banten untuk mendukung program penurunan Inflasi dengan menjadi konsumen cerdas dan bijak
4. Melakukan evaluasi terhadap penetapan indikator rata – rata pengeluaran yang diampu oleh Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui kolaborasi Program dan Kegiatan yang dapat mendukung capaian tersebut, sehingga diharapkan hasil capaian rata – rata

pengeluaran wisatawan akan optimal.

5. Bidang pengembangan destinasi pariwisata melakukan pemetaan dan penataan destinasi wisata menggunakan skala prioritas berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan diharapkan dengan cara tersebut kelengkapan sarana penunjang dan pendukung termasuk atraksi dapat dioptimalkan guna meningkatkan kunjungan wisatawan

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap 2 (dua) sasaran yang diampu oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut :

a Anggaran

Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 14.837.963.000 terealisasi sebesar Rp. 14.363.409.558 atau sekitar 96,80 % adanya efisiensi anggaran ini disebabkan ada 1 (satu) jabatan eselon II yang belum terisi sehingga posisinya diisi sementara oleh Pelaksana Tugas (plt) yang besaran tunjangan kinerjanya disesuaikan berdasarkan aturan dan perundang - undangan yang berlaku namun begitu hal ini tidak mempengaruhi akan kinerja Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Belanja Langsung (BL)

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 36.216.870.919,- yang terealisasi hanya Rp 35.742.317.477,- atau sekitar 98.69 %. Efisiensi belanja ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yaitu ;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyerapan belanja kegiatan ini terkait belanja transportasi pada perjalanan dinas yang awalnya direncanakan per orang namun pada saat pelaksanaannya biaya transportasi dipergunakan secara tim (bersama – sama) sehingga efisiensi penggunaan uang transportasi monitoring dan evaluasi sisa per masing – masing orang pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penyerapan belanja kegiatan ini telah dilakukan efisiensi terhadap penggunaan biaya foto copy yang didasarkan kepada keperluan pelaporan rill sehingga dapat menghemat beberapa ratusan lembar kertas yang disediakan menyediakan sehingga terdapat efisiensi terhadap penggunaan lembar foto copy.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pembelanjaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga kantor yang sebagian besar masih dapat dipergunakan sehingga terdapat efisiensi pada kebutuhan perlengkapan

rumah tangga kantor ini

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyerapan belanja kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat s.d triwulan III kondisi kendaraan terawat dengan baik sehingga sisa penggunaan anggaran dikembalikan ke kas daerah.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

Penyerapan pada kegiatan ini berupa belanja kelengkapan pendukung dibayarkan sesuai dengan penggunaan anggaran sehingga lebih praktis dan efisien dan bagi pemberian uang saku peserta yang diberikan.

b. sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada tahun 2024 yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagaimana tabel dibawah ini

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang/UPT	-	2	1	-	-	-	3
4	Kepala Subbag	-	-	1	-	-	-	1
5	Fungsional	-	10	5	-	-	-	15
6	Staf / Pelaksana	-	4	13	8	-	7	32
7	Pramubakti Administrasi	-	2	12	-	1	14	29
TOTAL		0	19	33	8	1	21	84
% terhadap Jumlah Pegawai		0	22,62	39,29	9,52	1,19	25,00	100,00

Menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Banten didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 33 orang (39,29%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 19 orang (22,62%), D3 8 orang (9,52%), SLTA sebagai staf pelaksana dan pramubakti administrasi sebanyak 21 orang (25,00%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; namun untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Namun begitu dengan adanya keterbatasan SDM baik dari jumlah maupun tingkat kompetensinya tidak lantas membuat hal ini menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

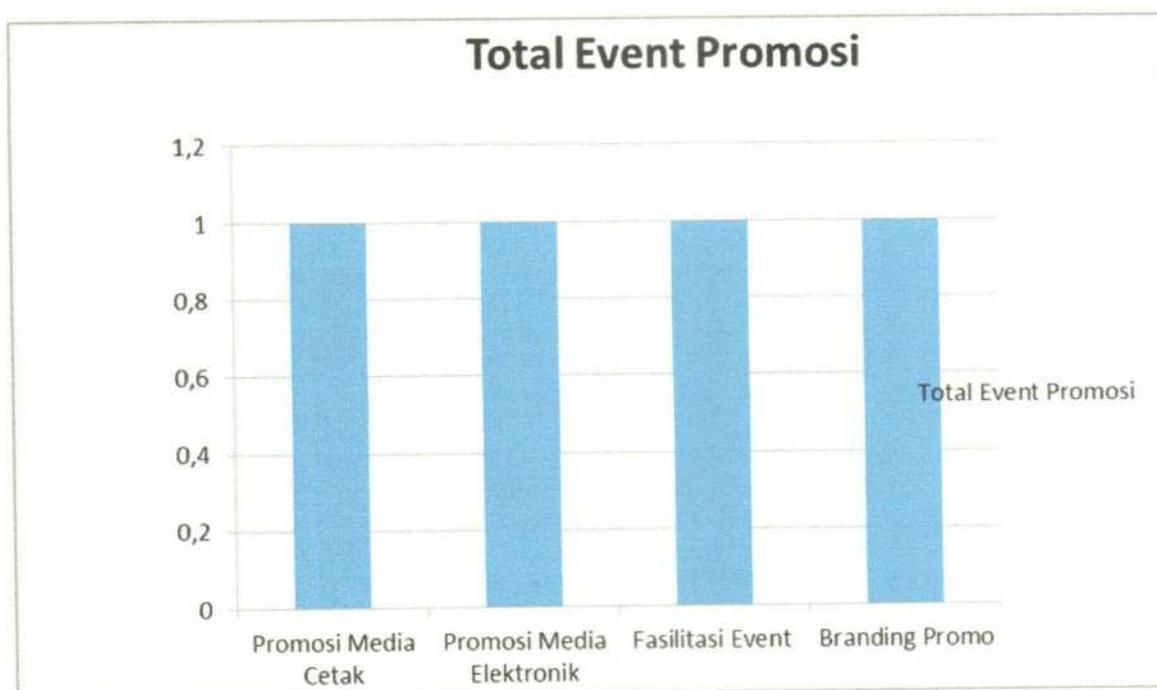
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan

Sasaran pertama "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)"

1. Program Pemasaran

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemasaran ini memiliki peran penting terhadap peningkatan promosi, kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara) serta investasi di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; sarana dan prasarana promosi, fasilitasi event dalam dan luar daerah serta aktivitas promosi media sosial kekinian sebagai sarana untuk memperkenalkan daya tarik wisata di Provinsi Banten.

Program ini menunjang Promosi Pariwisata yang berdampak terhadap Jumlah Kunjungan Wisata dengan pencapaian target sebagai berikut :



Capaian Target dan Realisasi 2024

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program Pemasaran	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	5	5	100
	Prosentase jumlah promosi wisata	100	100	100

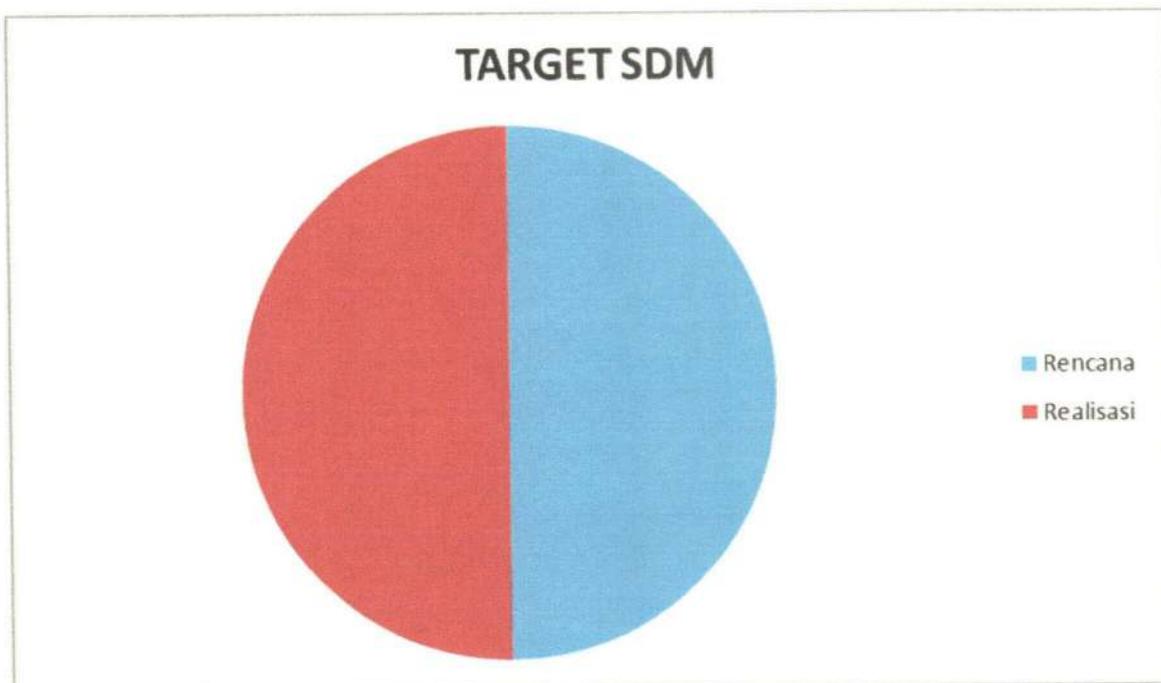
Sementara target promosi di tahun 2024 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah

sebesar 5 % dari 4 event promosi sehingga capaian **100 %** dengan predikat “**Sangat Baik**” Keberhasilan program ini lebih disebabkan karena optimalnya upaya promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program ini memiliki peran penting terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; Pemberian sertifikat, peningkatan peran masyarakat dalam rangka pengembangan kemitraan pariwisata dan fasilitasi pengembangan kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan kepada wisatawan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Pelaksanaannya sesuai amanat perundang – undangan dimana SDM yang diberikan pembekalan maupun pelatihan adalah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tingkat lanjutan dimana bagi SDM yang baru harus melalui tahapan pembinaan dan pelatihan di Dinas Pariwisata Kab/Kota sehingga pemanfaatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan perekonomian masyarakat di Banten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.



Capaian Target dan Realisasi 2023

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2624 Orang	2624 Orang	100

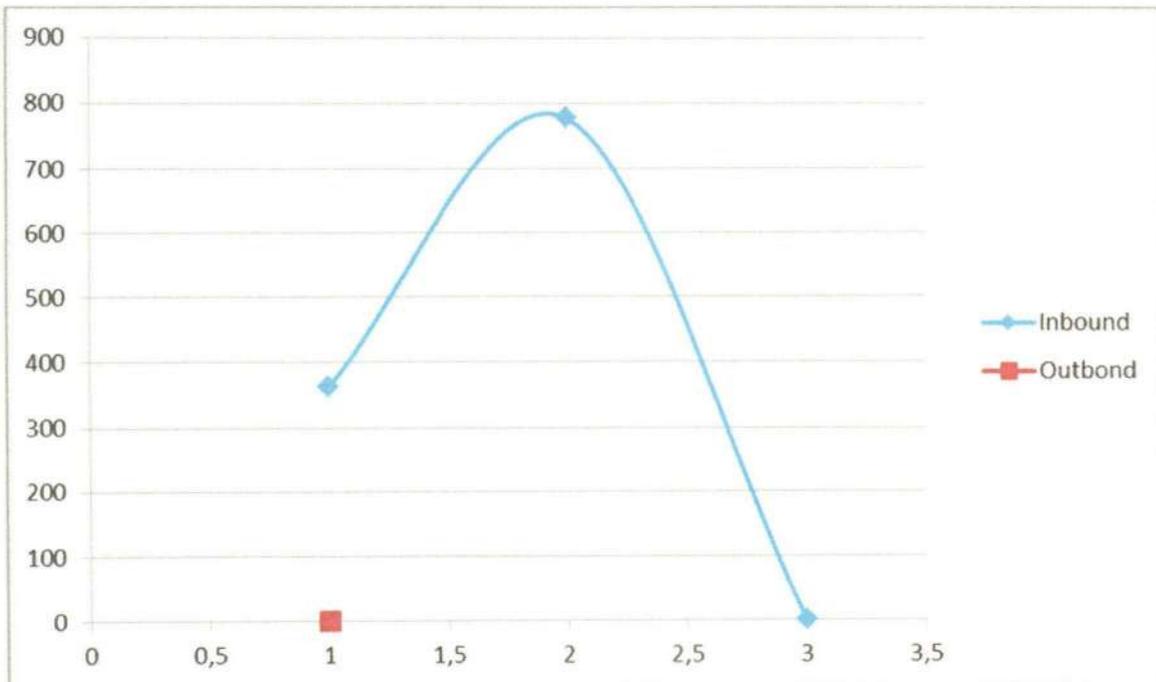
Berdasarkan share kontribusi dan pentargetan SDM di Tahun 2024 bahwa pencapaian indikator sasaran dengan target 2624 pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina telah tercapai sehingga capaian kinerjanya mencapai **100 %** dengan predikat "Sangat Baik" Keberhasilan program ini lebih disebabkan karena adanya dukungan kuat dari Dinas Pariwisata Kab/Kota serta Stakeholder Pariwisata dalam merekomendasikan peserta terbaiknya untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi (sertifikat) dalam rangka mengoptimalkan SDM Pariwisata yang handal dan profesional agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan di Banten.

Program Kegiatan yang tidak optimal dalam melakukan pencapaian target adalah

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki peran penting terhadap peningkatan Pelaku Industri pariwisata yang profesional dalam pemenuhan kapasitas dan kapabilitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi ; fasilitasi dan pembinaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diarahkan kepada pendukung pengembangan pariwisata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.



Dimana konsultan PT Sketsa Negeri Mandiri telah melakukan penyusunan dokumen neraca satelit pariwisata daerah (Nesparda) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2024 yang diperoleh dari pengolahan data primer hasil survey 2023, data studi literatur Nesparda 2015 dan 2022 serta simulasi dan perhitungan matematis diperoleh hasil Dampak belanja pariwisata di Provinsi Banten pada tahun 2023 dengan rata-rata sebesar Rp. 3.172.274,- pada tahun 2024 (yang dilaporkan pada dokumen Nesparda 2024) Sehingga target pengeluaran rata – rata wisatawan (nusantara dan mancanegara) berdasarkan target sebesar Rp. 5.248.739 tercapai hanya Rp 3.172.274,- sehingga jika dihitung prosentasenya tercapai **76.16 %** dengan predikat “Tinggi”

Faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut :

- Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih belum bisa bersaing baik dari segi rasa (*flavour*) dan harga (*price*) serta pemasaran (*outlet*) produk lokal yang belum optimal di destinasi kawasan strategis pariwisata provinsi Banten.
- Daya beli masyarakat yang berkurang karena adanya inflasi yang mempengaruhi ekonomi

2. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini memiliki peran penting terhadap peningkatan daya saing pariwisata di Banten terutama dalam pemenuhan aspek strategis dalam penataan dan pengembangan destinasi pariwisata meliputi ; amenitas, atraksi dan aksesibilitas sebagai penopang dalam peningkatan kunjungan wisatawan.

Fokus pembangunan daya tarik kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten di tetapkan pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.



Berdasarkan berita resmi statistik BPS Perwakilan Banten yang disampaikan informasi perkembangan terkait rata – rata lama menginap tamu (asing dan nusantara) di Provinsi Banten untuk s.d Bulan Desember 2024 terhitung 1.37 hari sehingga target capaian dari 1.72 hari adalah sebesar **79,65 %**, dengan predikat “Tinggi” dan ini memiliki potensi untuk mengalami peningkatan lama inap pada capaian bulan Desember.

Faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya faktor cuaca yang mempengaruhi wisatawan khawatir berkunjung ke obyek wisata alam (Pantai, Gunung dsb)
- b. Faktor daya tarik / destinasi wisata di Provinsi Banten bagi wisatawan dianggap belum begitu menarik sehingga lama inap menjadi tidak optimal

Misi : 4 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Sasaran kedua "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan"

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat menyatakan kategori dari hasil penilaian sebagai berikut AA: nilai SAKIP > 90 - 100 A: nilai SAKIP > 89 - 90 BB: nilai SAKIP > 70 - 80 B: nilai SAKIP > 60 - 70 CC: nilai SAKIP > 50 - 60 C: nilai SAKIP > 30 - 50 D: nilai SAKIP 0 - 30

Sumber data penilaian kinerja SAKIP diambil berdasarkan penilaian laporan hasil evaluasi (LHE) yang dilakukan oleh aparatur kinerja internal pemerintah (AKIP) yaitu Inspektorat Provinsi Banten meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Tindak Lanjut Hasil Evalua

Analisis ketercapaian kinerja Sasaran Kedua "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan" keberhasilannya dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Pada saat dilakukan penilaian oleh APIP terpenuhinya seluruh
2. komponen penilaian SAKIP dengan peroleh skor 78.15 % dari target 70.00 % sehingga capaiannya mencapai 111,64 %
3. Terpenuhinya komponen atau nilai indikator pada setiap aspek perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan oleh evaluator SAKIP Inspektorat.
4. Adanya *tools* yang disediakan oleh Bappeda dan BKD seperti penggunaan system manajemenn pengukuran kinerja (SIKAP) oleh BKD Banten mempermudah para Middle manager (PPTK) melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pekerjaan harian yang umumnya terhubung dengan kegiatan baik sebagai kinerja penunjang maupun pendukung sehingga efektifitas pengawasan berjalan baik dan hal tersebut serta adanya penilain kinerja program/kegiatan yang terakomodir dalam Sistem Informasi Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (SIMAKIP) berdampak terhadap performa kinerja serta lebih akuntabel
5. Berjalannya core asn value yang ditandai dengan lebih disiplin nya para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan serta mampu mempedomani nilai – nilai dalam ASN Berakhkal tersebut.

6. Adanya pedoman pelaksanaan kegiatan yang dapat dipedomani oleh aparatur pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan, pengelolaan asset serta perencanaan dan pelaporan memudahkan para aparatur dalam melaksanakan kegiatannya.
7. Tercapainya sasaran ini ditunjang oleh keberhasilan capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian 100%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

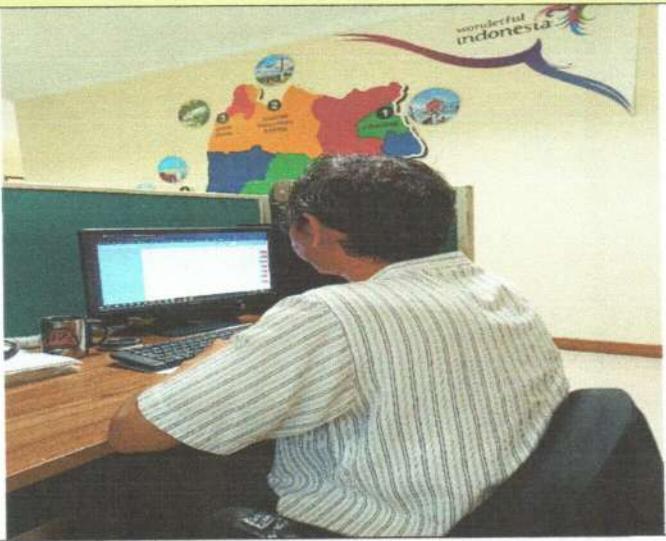
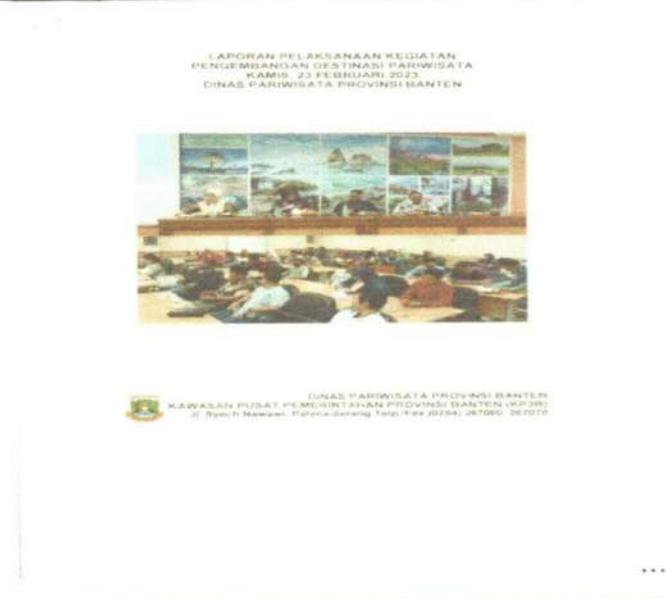
Misi : 4 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Sasaran kedua "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan"

Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah pada tahun 2024 berjalan efektif dan efisien hal ini terlihat dari capaian program yang mencapai target 100 % dari target yang ditetapkan terhadap ketercapaian seluruh program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja program maupun sasaran.

Crosscutting lintas

Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 2024

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	MITRA KEGIATAN	FOTO DOKUMENTASI
1	2	3	4	5
1	Validasi Data Kunjungan Wisata dari Kab/kota melalui Sistem Informasi Pariwisata Daerah dalam rangka menghitung jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten	
2	Koordinasi pengembangan destinasi wisata melalui pemanfaatan Sistem Informasi Standarisasi Destinasi Wisata (SisDewi) guna meningkatkan pemanfaatan pengembangan destinasi wisata di Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten dan Kelompok Sadar Wisata	
3	Kegiatan Siaga Wisata dalam rangka pengamanan wisatawan dalam menyambut perayaan natal dan tahun baru 2024 di Destinasi Wisata KSPB Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten, Kelompok Sadar Wisata dan Stakeholder Pariwisata lainnya	

4	Kegiatan forum koordinasi dan komunikasi para pelaku pariwisata	Destinasi Wisata di 8 Kab/Kota	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten, Kelompok Sadar Wisata dan Stakeholder Pariwisata lainnya	
5	Partisipasi Fasilitasi Promosi Pariwisata dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Provinsi Banten Kementerian Pariwisata, UMK dan Stakeholder Pariwisata lainnya	

3.2 RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Dinas Pariwisata			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,947,612,900	19.135.337.343	95,93
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	127,340,000	112.771.688,	88,56
b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		55,110,000	51,209,267	92,92
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
		6,500,000	6.166.162	94,86
d	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		6,000,000	5,666,162	94,44
e	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
		6,000,000	5.666.163	94,44
f	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
		6,000,000	5,666,162	94,44
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		18,240,000	16.504.574	90,49
h	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		29,490,000	21.893.198	74,24
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	15,807,424,000	15.351.908.309	97,12
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		15,408,899,000	14.984.277.257	97,24
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
		366,525,000	335.880.000	91.64
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		6,000,000	5.931.246	98.85
d	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
		6,000,000	5,941,000	99.24

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		3,000,000	2,965,781	98.86
f	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
		6,000,000	5.965.781	99,43
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
		6,000,000	5.953.631	99.23
h	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
		5,000,000	4,980,513	99.61
3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	2,000,000	1,518,750	75.94
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
		500,000	339,875	67,98
b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
		500,000	339,875	67,98
c	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		500,000	419,500	83,90
d	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		500,000	419,500	83,90
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	44,500,000	39.974.375,	89,83
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
		500,000	339,875	67,98
b	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
		500,000	339,875	67,98
c	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
		500,000	339,875	67,98
d	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
		15,000,000	13,000,000	86,67
e	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
		28,000,000	25.954.750	92,70
5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	582,790,000	461.380.026	79,17
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		9,634,000	8,635,800	89,64

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		272,670,000	247.786.220	90,87
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		31,540,000	19,593,846	62,12
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
		43,964,000	38,250,000	87,00
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
		10,510,000	8,777,500	83,52
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		164,807,000	90,751,000	55,07
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		3,000,000	2,835,830	94,53
h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
		46,665,000	44,749,830	95,90
6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>205,137,000</i>	<i>190,950,000</i>	<i>93,08</i>
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		205,137,000	190,950,000	93,08
7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>2,630,921,900</i>	<i>2.509.558.782,</i>	<i>95,39</i>
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		401,021,900	344.416.670	85,88
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		2,229,900,000	2,165,142,112	97,10
8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>547,500,000</i>	<i>467.275.413</i>	<i>85.35</i>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		195,500,000	159.875.428	81.76
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		175,000,000	166.091.804	94.91
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		102,000,000	66.921.481	65.61
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		75,000,000	74,386,700	99.18

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	20,739,843,200	20.044.349.055	96,65
1	<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</i>	6,400,610,000	6.249.189.400	97.63
a	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi			
		6,400,610,000	6.249.189.400	97.63
2	<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	11,147,500,000	10.827.211.365	97.13
a	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
		450,000,000	429,312,000	95.40
b	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
		3,000,000,000	2.971.681.870	99.06
c	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
		4,000,000,000	3.842.722.000	96.07
d	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
		3,697,500,000	3,583,495,495	96.92
3	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>	2,691,733,200	2.525.228.600	93.81
a	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
		741,010,000	632,820,000	85.40
b	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
		1,950,723,200	1.892.408.600	97.01
4	<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	500,000,000	442.719.690	88.54
a	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah			
		200,000,000	175,311,040	87.66
b	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar			
		300,000,000	267.408.650	89.14
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5,988,124,377	5,879,272,035	98.18
1	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	5,988,124,377	5,879,272,035	98.18
a	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
		3,388,124,377	3,333,844,098	98.40
b	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		500,000,000	476,547,615	95.31
c	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		2,100,000,000	2,068,880,565	98.52
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1,400,000,000	1,249,975,420	89.28
1	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</i>	1,100,000,000	975,942,157	88.72
a	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik			
		1,100,000,000	975,942,157	88.72
2	<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	300,000,000	274,033,263	91.34
a	Perlindungan Hasil Kreativitas			
		150,000,000	143,775,000	95.85
b	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			
		150,000,000	130,258,263	86.84
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2,504,700,000	2.400.946.079	95.86
1	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</i>	2,004,700,000	1.918.006.977	95.68
a	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
		200,000,000	194.639.945	97.32
b	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			
		1,304,700,000	1,236,391,419	94.76
c	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
		500,000,000	486.975.613	97.40
2	<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	500,000,000	482.939.102	96.59
a	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			
		200,000,000	193.435.688	96.72
b	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif			
		300,000,000	289,503,414	96.50
	J U M L A H	50,580,280,477	48.709.880.432	96.30

Perlu kami sampaikan bahwa untuk capaian kinerja kegiatan seluruhnya telah tercapai **100 %** berdasarkan output kinerja kegiatan yang telah disampaikan oleh masing – masing bidang,, dimana dalam laporan kinerja ini untuk capaian output kegiatan hingga sub kegiatan tidak kami tampilkan namun untuk hasil keluaran kegiatannya dapat terlihat dari output kinerja program sebagaimana yang telah digambarkan dalam capaian program pada tabel sebelumnya.

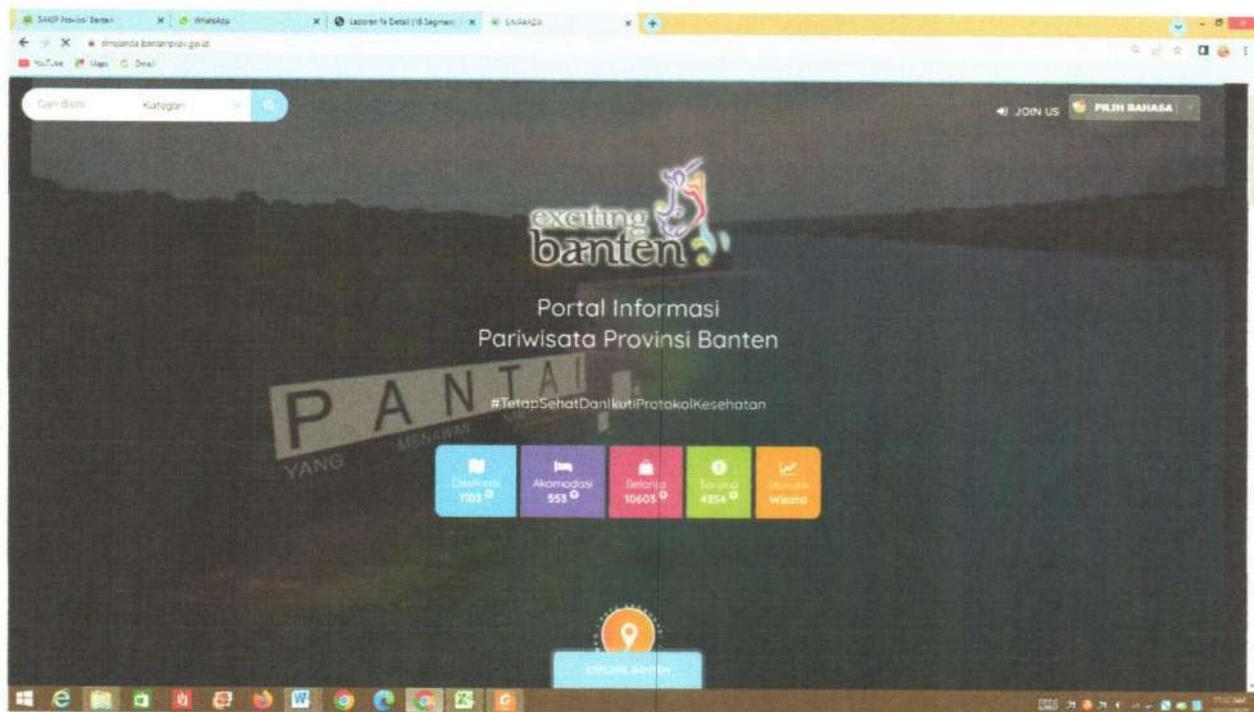
3.3 INOVASI

Nama Inovasi Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah (SIMPARDA), Konsep kepariwisataan menyangkut berbagai sektor sehingga dampaknya baik terhadap pertumbuhan, pemerataan dan polainvestasi yang juga multi sektor. Pada tingkat daerah, dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah, sudah jelas berdampak signifikan dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian daerah. Upaya dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan daerah dalam pembangunan pariwisata sangatlah penting dan mutlak di lakukan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang cepat dan terkoneksi dengan seluruh masyarakat, pemerintah serta stake holder kepariwisataan, sehingga dengan adanya sistem informasi pariwisata yang integratif dapat mensosialisasikan serta menjual (selling) produk wisata pada daerah tersebut, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan kunjungan wisatawan baik lokal, regional maupun internasional. Saat ini informasi dan data tentang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah baru sebagian dilakukan secara terpisah-pisah di setiap kabupaten/kota, oleh karena itu, dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (SIMPARDA) yang dikoneksi dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten keseluruhan kabupaten dan kota di Provinsi Banten akan berdampak pada cepatnya informasi penyampaian data tentang perkembangan dan dampak pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten.

Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah suatu sistem, konsep dan metode tampilan informasi uantitatif dan kualitatif yang menyediakan perangkat informasi serta bahan analisis yang menyeluruh (general), kompak (compact), saling berkait (interconnected), konsisten (consistent) dan kontrol (control) yang mendeskripsikan secaramenyeluruh tentang kondisi terkini (eksisting data) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Sistem informasi ini akansangat berguna dan sangat bagi pengambil kebijakan stake holder kepariwisataan, dalam menyusun perencanaan, dan programpembangunan di tingkat daerah Ruang lingkup dalam rangka kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah, yaitu : Informasi kepariwisataan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang meliputi informasi tentangdestinasi wisata secara menyeluruh di masing-masing Objek Destinasi di Wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Banten.Kegiatan ini hanya mencakup kepariwisataan di wilayah provinsi Banten dan hanya akan disajikan pada level provinsi melalui jaringan inter koneksi pada SKPD yang menangani tentang pariwisata daerah.

Tujuan Inovasi

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA Tahun 2024 ini adalah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (SIMPAN) yang dikoneksi dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten akan berdampak pada cepatnya informasi penyampaian data tentang perkembangan dan dampak pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten. Tujuan dari Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA adalah untuk menyusun suatu sistem, konsep dan metode tampilan informasi kuantitatif yang menyediakan perangkat informasi dan data yang menyeluruh (general), kompak (compact), saling berkait (interconnected), konsisten (consistent) dan kontrol (control) yang terkait dengan kepariwisataan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten.



Manfaat dan Hasil Inovasi

Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat mengetahui secara pasti terkait mulai dari Database Kepariwisatan serta Jumlah dan Kunjungan Pariwisata di Provinsi Banten setiap tahunnya. hal ini tentunya dapat menjadi parameter dalam mengukur PDRB (produk domestik regional bruto), rata – rata pengeluaran dan indikator keberhasilan lainnya di sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di Provinsi Banten

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 adalah pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran hingga Sub kegiatan yang selaras dan untuk menghasilkan kinerja yang berdampak terhadap capaian kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas melalui program dan kegiatan strategis sesuai yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang – undangan yang berlaku

Namun perlu kami sadari bahwa pencapaian kinerja pada tahun ini khususnya pada rata – rata pengeluaran wisatawan kurang membanggakan hal ini disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya :

- c. Daya beli masyarakat belum optimal faktor yang mempengaruhinya adalah adanya dampak resesi ekonomi sehingga wisatawan mengencangkan pengeluaran
- d. Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih belum bisa bersaing baik dari segi rasa (flavour) dan harga (price) serta pemasaran (outlet) produk lokal yang belum optimal di destinasi kawasan strategis pariwisata provinsi Banten.
- e. belum optimalnya keramahtamahan (hospitality) dari para pelaku pariwisata terhadap wisatawan yang berkunjung terutama bagi yang akan membeli produk

Akhir kata Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka pertanggungjawaban, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Serang, Februari 2025

**Plt. KEPALA DINAS
PARISWATA PROVINSI BANTEN**



Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si
NIP. 197306082002122003





PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURTOPO, MT**
Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS PARIWISATA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024

Pihak Kedua,


AL MUKTABAR

Pihak Pertama,



TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	49.091.421.689	50.580.280.477	1.488.858.788
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.026.198.489	19.947.612.900	(1.078.585.589)
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.465.223.200	20.739.843.200	2.274.620.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.000.000.000	5.988.124.377	(11.875.623)
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.000.000.000	1.400.000.000	400.000.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.600.000.000	2.504.700.000	(95.300.000)
	JUMLAH	49.091.421.689	50.580.280.477	1.488.858.788

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

PK. KEPALA DINAS PARIWISATA,



RI NURTOPO, MT

ANIP. 19660530 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 28 Februari 2025

Plt. Inspektur Daerah,

Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003